

**ANALISIS 25-YEAR COOPERATION AGREEMENT ANTARA IRAN DAN
TIONGKOK TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ZAHROTUL FIRDAUS

19323098

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS 25-YEAR COOPERATION AGREEMENT ANTARA IRAN DAN
TIONGKOK TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ZAHROTUL FIRDAUS

19323098

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis 25-Year Cooperation Agreement Antara Iran dan Tiongkok Tahun
2016 - 2021**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

5 Juli 2023

Mengesahkan

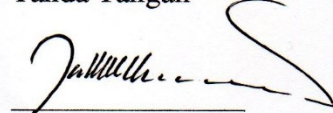
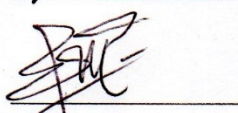
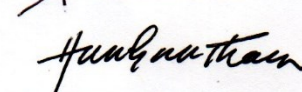
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 12 Juli 2023



Zahrotul Firdaus (19323098)

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	12
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	12
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	13
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	13
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II	15
2.1 <i>China-Iran 25-Year Cooperation Agreement</i>	15
2.2 Sejarah Hubungan Kerja Sama Iran dengan Tiongkok	17
<i>2.2.1 Sharing ‘Common History’</i>	17
<i>2.2.2 Hubungan Iran Tiongkok pada awal 1990s</i>	17
<i>2.2.3 Hubungan Iran Tiongkok di Bipolar World</i>	19
<i>2.2.4 Hubungan Iran Tiongkok Pada Tahun 2000-2021</i>	20
BAB III	23
3.1 Keadaan Politik Dalam Negeri Iran Yang Mendorong <i>China-Iran 25-Year Cooperation Agreement</i>	24
3.1.1 Faksionalisme di Iran	24
3.1.2 Hubungan Birokrasi, Partai, Kepentingan, dan Faksionalisme Pendorong Kesepakatan <i>China-Iran 25-Year Cooperation Agreement</i>	25
3.1.3 Determinan Media Massa Pendorong Kesepakatan <i>China-Iran 25-Year Cooperation Agreement</i>	29
3.1.4 Determinan Kepentingan Pendorong Kesepakatan <i>China-Iran 25-Year Cooperation Agreement</i>	32

3.2 Keadaan Ekonomi dan Militer Iran Yang Mendorong <i>China-Iran 25-Year Cooperation Agreement</i>	33
3.2.1 Dimensi Ekonomi	33
3.2.2 Dimensi Kemampuan Militer	35
Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer	36
Tingkat Ketergantungan pada Sumber – Sumber Luar Negeri	38
Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer	40
3.3 Konteks Internasional Pendorong <i>China-Iran 25-Year Cooperation Agreement</i>	42
3.3.1 Setting Ekologis	42
3.3.2 Arus idea	44
3.3.3 Arus Manusia	46
3.3.4 Ekonomi Internasional	48
Syria – Iran – Tiongkok	48
Irak – Iran – Tiongkok	50
CPEC (<i>China Pakistan Economic Corridor</i>) dan Fokus Iran pada Macran Coast	50
Iran-Taiwan-Tiongkok	50
3.3.5 Hukum Internasional	51
BAB IV	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2 Saran dan Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58

Abstrak

Hubungan Iran dan Tiongkok melebar hingga ke banyak domain seperti di dalam domain geopolitik, ekonomi, militer, dan diplomasi sejak Revolusi Iran tahun 1979. Kesepakatan yang baru – baru ini, yaitu *25-year Cooperation Agreement* antara Iran dengan Tiongkok, menindaklanjuti kerja sama yang telah lama dibangun. Ketika, kedua pemerintahan ini sangat tertarik pada kesepakatan ini, banyak masyarakat Iran yang melakukan protes untuk menggagalkan kesepakatan ini setelah beberapa dokumen dari kesepakatan ini tersingkap di media massa. Oleh karena itu berdasarkan fakta – fakta ini, tulisan ini akan menganalisis berbagai macam faktor dari sisi Pemerintahan Iran atas persetujuannya terhadap kesepakatan ini. Untuk ini, tulisan ini menganalisis tiga faktor yang kuat untuk menjawab keikutsertaan Iran dalam *25-year Cooperation Agreement* yaitu: politik domestik Iran; objektifitas keadaan ekonomi dan militer Iran; serta konteks internasional yang pada saat itu terjadi yang membentuk sebuah pola untuk Pemerintahan Iran untuk setuju dalam kesepakatan ini.

Kata Kunci: Iran, Tiongkok, *Iran-China 25-year Cooperation Agreement*, Politik Domestik Iran, Keadaan Ekonomi dan Militer Iran, Konteks Internasional.

Abstract

Iran-China relations have expanded into many domains such as in the domain of geopolitics, economy, military, and diplomacy since the 1979 of Iranian revolution. The present agreement, the 25-year Cooperation between Iran and China that have been approved by both parties, ensued these old relationships. While both governments deeply engaged in this agreement, the people of Iranian itself held many protests to undo this agreement after some of documents had leaked on social media. Notwithstanding, this paper analyzes various factors from the side of Iranian government over its decision in this agreement. For this, this paper examines three plausible answers of Iranian engagement in the 25-year Cooperation Agreement: the domestic politics of Iranian government; economic and military objectivity; and current international contexts that shaped a pattern to make Iranian government engage in this agreement.

Keywords: Iran, China, *Iran-China 25-year Cooperation Agreement*, Iranian Internal Politics, Economic-Military Objectivity, International Contexts.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Januari 2016, Preseiden Rouhani mendapatkan kunjungan dari Presiden Xi Jinping. Di dalam kunjungan tersebut, Presiden Xi Jinping menawarkan proposal untuk membentuk perjanjian bilateral dengan Iran. Enam bulan setelahnya, Presiden Hassan Rouhani menandatangani draft proposal program perjanjian bilateral dan memberikan perintah agar Perdana Menteri Iran menyempurnakan negosiasinya dengan China. Negosiasi terus berlangsung hingga berakhir pada Oktober 2020. Dengan proses negosiasi yang cukup panjang, pada akhirnya perjanjian ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Iran–Mohammad Javad Zarif dengan Perdana Menteri Tiongkok–Wang Yi, pada 27 Maret 2021 yang kemudian perjanjian ini dikenal dengan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* (China Briefing Team 2021). Meskipun terdapat adanya ratifikasi, namun tidak ada *binding* yang artinya masing – masing baik Iran maupun China dapat membatalkan komitmennya terhadap perjanjian kerja sama ini jika perjanjian ini sudah tidak lagi dibutuhkan (Iran Government 2021).

China-Iran 25-Year Cooperation Agreement berbicara mengenai pertukaran minyak murah Iran dengan investasi China ke perekonomian Iran. Investasi China di sini adalah berupa bantuan China terhadap pembangunan jaringan komunikasi, rumah sakit, dan kereta bawah tanah di Iran. Kurang lebih

terdapat 100 proyek yang direncanakan oleh Presiden Xi Jinping dalam realisasi dari perjanjian ini (China Briefing Team 2021).

China-Iran 25-Year Cooperation Agreement bukan menjadi suatu hal yang asing, sehingga dunia harus terkejut dengan kerja sama antara dua negara ini. Mengingat bahwa Tiongkok ikut serta dalam membantu support militer saat perang Irak-Iran. Perang Irak-Iran akan sangat menimbulkan kerugian yang lebih besar jika seandainya Tiongkok tidak membantu Iran, seperti bantuan Tiongkok berupa penyediaan Silkworm anti-ship missiles. Selain itu, Tiongkok juga pernah melakukan veto terhadap resolusi *United Nations Security Council* (UNSC) untuk melakukan embargo senjata untuk Iran. Iran juga mendapatkan support diplomatik dari Tiongkok untuk menghentikan Perang Irak-Iran di UNSC. Hubungan antar keduanya juga lebih membaik saat insiden Tiananmen Square pada Juni 1989. Di saat Tiongkok mendapatkan tekanan terhadap kasus pelanggaran HAM pada insiden Tiananmen Square, Iran justru memberikan support terhadap Beijing (Belal 2020, 50).

Pembicara dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian mengatakan lebih lanjut mengenai *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* bahwa,

“Perjanjian tersebut tidak mencantumkan secara kuantitatif dan spesifik kontrak. Tidak pula perjanjian ini menargetkan adanya pihak ketiga. Perjanjian ini hanya memberikan gambaran umum mengenai perjanjian Iran-China di masa yang akan datang (China Briefing Team 2021)”

Dengan tidak adanya spesifik kontrak di dalam implementasi perjanjian ini, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama 25 tahun yang mendatang, misalnya dalam permasalahan lingkungan, mekanisme *stick and carrot*, dan tata kelola implementasi. Meskipun di sisi lain, terdapat beberapa pendapat yang dikeluarkan oleh Dezan Shira & Associates (2021) bahwa China dan Iran memiliki kesamaan kepentingan dalam menanamkan teknologi dan inovasi mereka ke pasar underdeveloped (China Briefing Team 2021; Tehran Times 2021).

Suatu hal lain yang mengganjal dalam perjanjian ini adalah pada periode negosiasi yang dibutuhkan adalah terlalu lama yaitu selama 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Selain itu, jika dilihat dari delapan inti penting dari *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* adalah sangat memihak pada Tiongkok terutama pada proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) milik Tiongkok serta tidak menunjukkan adanya implementasi teknologi Iran. Beberapa dari poin – poin tersebut adalah seperti pada poin pertama bahwa Iran harus memberikan suplai minyak kepada Tiongkok selama 25 tahun dengan harga yang rendah dan sebagai gantinya, Tiongkok akan berinvestasi berupa pembangunan infrastruktur di Iran sebanyak US\$400 miliar (China Briefing Team 2021). Pada poin pertama ini, baik Iran maupun dengan Tiongkok mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini. Meskipun, dalam hal infrastruktur, Iran masih mendapatkan ketidakjelasan dalam hal permasalahan – permasalahan dalam implementasinya. Sedangkan, Tiongkok mendapatkan keuntungan pasti berupa mendapatkan minyak Iran dengan harga yang sangat rendah.

Poin yang kedua adalah terdapat syarat penggunaan mata uang Tiongkok (yuan) dalam proses mekanisme perdagangan (China Briefing Team 2021). Dalam

poin yang kedua ini, Iran juga masih mendapatkan ketidakjelasan mengingat bahwa mata uang Tiongkok mudah berubah – ubah (BBC 2019; The Economist 2022), sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Iran. Pada poin yang ketiga, Tiongkok menjadikan Iran sebagai titik poin rute jalur sutra ke Timur Tengah dibandingkan harus melalui Arab Peninsula (China Briefing Team 2021). Pada poin ketiga, sekali lagi Tiongkok mendapatkan izin untuk memudahkan proyek jalur sutranya ke Timur Tengah tanpa harus mendapatkan persyaratan tertentu dari Iran.

Pada poin keempat, terdapat pembolehan bagi Tiongkok agar Tiongkok dapat membangun depot minyak di wilayah Tiongkok dan bahkan mengekspor kembali minyak tersebut tanpa diharuskan membayar pajak. Pada poin kelima dan keenam juga berhubungan dengan kepentingan proyek jalur sutra Tiongkok. Seperti pada poin keenam terdapat pembangunan pipa gas dan minyak dari Iran bagian Selatan hingga ke Tripoli. Adapun pada poin keenam terdapat poin agar kedua belah pihak baik Iran maupun Tiongkok untuk berkolaborasi dengan Rusia untuk menghubungkan laut Oman dan Arabian gulf dengan Eropa Utara melalui Azerbaijan dan Russia (China Briefing Team 2021).

Hanya dua dari delapan poin penting dari *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* yang benar – benar memberikan lebih banyak keuntungan dari kerugian bagi Iran yaitu poin ketujuh berupa adanya kerja sama intelligence dan mengembangkan infrastruktur informasi untuk jaringan telekomunikasi 5G dan poin kedelapan berupa adanya kerja sama militer, keamanan, dan defence yang mencakup training, research, dan interaksi dalam isu – isu strategis (China Briefing Team 2021). Meskipun pada poin ketujuh, juga terdapat beberapa perbedaan

pendapat menurut masyarakat Iran seperti infrastruktur milik Tiongkok dianggap oleh masyarakat Iran sebagai *low-tech* serta adanya ketakutan bagi masyarakat Iran karena investasi infrastruktur yang diberikan oleh Tiongkok cenderung bersifat utang, hal ini dikhawatirkan akan memperburuk perekonomian Iran. Kekhawatiran ini sering disimbolkan oleh masyarakat Iran dengan hashtag #IranNot4SELLnot4RENT (Rasanah 2020). Walaupun demikian, Iran tetap menyepakati kerja sama tersebut dengan menyepakatinya pada tahun 2021 pada acara pertemuan antara Perdana Menteri Iran–Mohammad Javad Zarif dengan Perdana Menteri Tiongkok–Wang Yi. Maka dari itu, alasan di balik kesepakatan Iran dalam bekerja sama dengan Tiongkok melalui *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* menarik untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Iran menyepakati kerja sama *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* pada tahun 2016 - 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis alasan Iran menyepakati kerja sama *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* ditinjau dari keadaan politik domestik, ekonomi dan militer, konteks internasional.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Iran yang telah menyetujui *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* pada tahun 2021 di tengah gejolak penolakan dari publik dalam negeri Iran. Penelitian ini akan mengidentifikasi tiga area penting yang melatarbelakangi proses pembuatan kebijakan luar negeri Iran dalam merumuskan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*.

Area yang pertama adalah pada politik domestik Iran yang mencakup struktur pemegang kekuatan dalam merumuskan kebijakan luar negeri Iran dan polemik ideologi di dalam struktur tersebut dan kelompok kepentingan. Area yang kedua adalah mencakup keadaan perekonomian Iran dan kapabilitas militer yang dimiliki oleh Iran. Area yang ketiga adalah pada kondisi keadaan politik internasional dan geopolitik regional yang mendorong Iran untuk menyetujui *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Telah terdapat beberapa literatur yang ditulis mengenai polemik kerja sama *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*, salah satunya yaitu Mohammadbagher Forough di dalam artikelnya yang berjudul “*Sino-Iranian 25-Year Deal: Implications for NATO and Europe*” pada tahun 2021. Meskipun di dalam artikel tersebut Mohammadbagher Forough membicarakan bagaimana implikasi dari kerja sama Iran-Tiongkok terhadap NATO dan negara – negara di Eropa, Mohammadbagher Forough juga mendeskripsikan mengenai beberapa alasan yang mencakup salah satu dari tiga area penting yang akan dibahas dalam

penelitian ini, yaitu adanya perpecahan kondisi politik dalam negeri Iran ketika berbicara mengenai proses pembuatan kesepakatan internasional. Ayatollah Khamenei sebagai pemimpin strategis Iran berpendapat bahwa Iran juga harus memiliki kedekatan yang strategis dengan negara – negara di Timur atau *'look to the East'* (Forough 2021b).

Beberapa literatur lain yaitu yang ditulis oleh Sima Shine, Eyal Propper and Bat Chen Druyan Feldman yang berjudul *"Iran and China: On the Way to a Long-Term Strategic Agreement?"* pada tahun 2020. Artikel tersebut membicarakan mengenai kepentingan yang diharapkan dari Iran dan Tiongkok dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*. Selain itu, artikel tersebut juga membahas secara singkat mengenai dua area yang penting dalam menjawab alasan Iran bekerja sama dengan Tiongkok yaitu area politik internasional dan geopolitik regional serta area ekonomi. Sima Shine, Eyal Propper and Bat Chen Druyan Feldman menjelaskan area politik internasional yang mendorong Iran menyepakati *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* dengan memaparkan keadaan – keadaan yang menimpa Iran di ranah internasional seperti sanksi ekonomi yang diberikan oleh Pemerintahan Amerika Serikat kepada Iran, pembunuhan al-Quds Qassem Soleimani, tekanan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB terkait embargo persenjataan, dan lain sebagainya (Shine et al. 2020).

Di dalam dua literatur yang ditulis oleh Mohammadbagher Forough (2021) serta Shine, Propper and Feldman (2020), hanya menjelaskan secara singkat dan terpisah mengenai tiga area yang mendorong Iran menyepakati kerja sama dua puluh lima dengan Tiongkok, namun kedua literatur tersebut tidak menjabarkan secara mendalam mengenai struktur politik Iran dalam proses pembuatan *China-*

Iran 25-Year Cooperation Agreement dan ideologi – ideologi serta kekuatan yang dimiliki oleh setiap aktor politik Iran. Selain itu, di dalam artikel tersebut juga tidak menempatkan alasan Iran menyetujui *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* sebagai rumusan masalah utama. Ditambah, dalam area ekonomi, literatur tersebut tidak menjelaskan secara mendetail seperti mengenai ekspor – impor ilegal Iran di tengah sanksi ekonomi, perusahaan Iran yang dikenai sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, terdapat banyak literatur yang menjelaskan secara penuh mengenai tiga area penting yaitu politik domestik, ekonomi dan militer, konteks internasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun, belum ada di antara literatur – literatur tersebut yang menjelaskan mengenai alasan Iran bersepakat dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*. Beberapa literatur tersebut adalah seperti yang ditulis oleh Arian M. Tabatabai yang berjudul “*Iran’s National Security Debate*” pada tahun 2019 yang secara singkat menjelaskan proses pembuatan kebijakan luar negeri Iran dalam kasus kesepakatan nuklir Iran dengan negara – negara Barat. Di dalam literatur tersebut, Arian M. Tabatabai menjelaskan mengenai konsensus dan divisi – divisi dalam pembuatan kebijakan luar negeri Iran serta debat internal dalam divisi – divisi tersebut, kemampuan militer dan ekonomi, orientasi internasional yang berkaitan dengan hubungan Iran dengan Amerika Serikat serta kondisi keamanan regional yang mendorong Iran menyetujui *Iran Deals* (Tabatabai Ariane M. 2019).

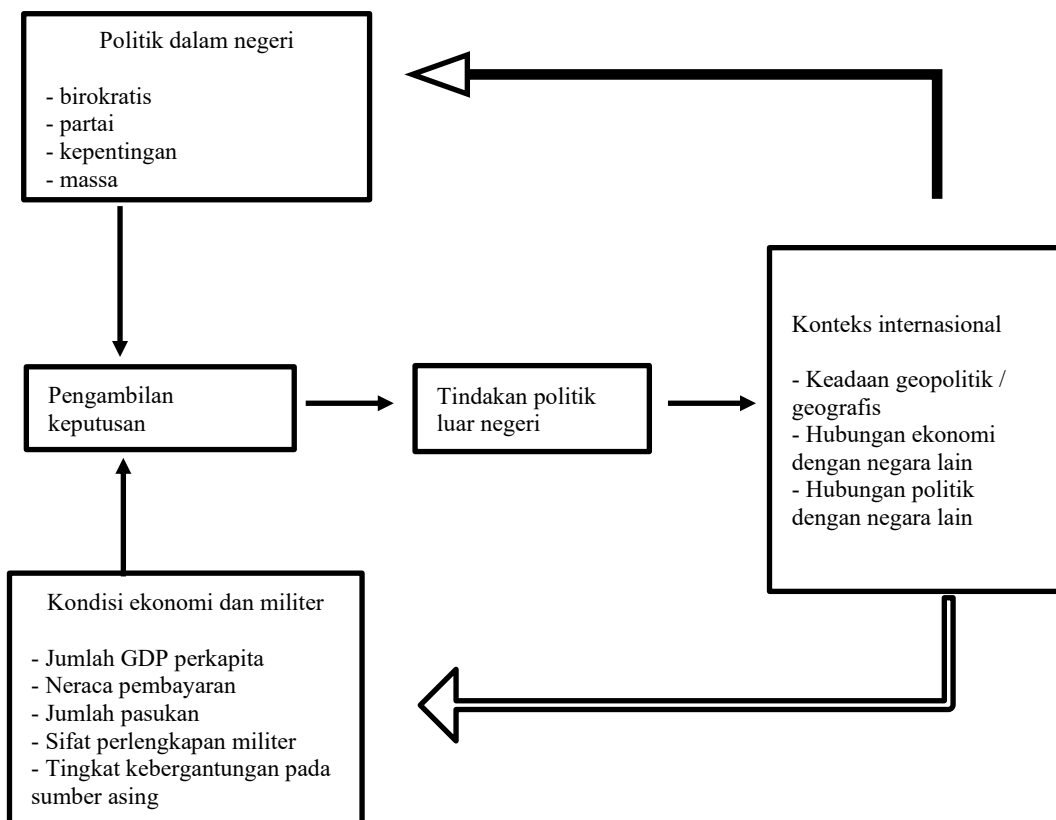
Selain itu, terdapat artikel lain yang ditulis oleh Arian M. Tabatabai juga yang berjudul “*Nuclear Decision-Making in Iran: Implications for US and Nonproliferation Efforts*” pada tahun 2020 yang menjelaskan mengenai proses

pembuatan kebijakan luar negeri Iran yang dilihat dari sudut pandang politik domestik dan inti konsep pemikiran yang dimiliki oleh orang – orang Iran. Namun, artikel ini membicarakan mengenai *Iran Deals* atau perjanjian nuklir Iran dengan negara - negara Barat (Tabataba Ariane 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggabungkan beberapa penelitian yang ada mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Iran dalam perjanjian *China-Iran 25-year cooperation agreement* dengan Tiongkok melalui tiga area fokus penting yaitu politik domestik Iran, ekonomi dan militer Iran, dan keadaan internasional yang mendorong kesepakatan tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran untuk menjawab penelitian alasan kerja sama Iran dengan Tiongkok dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* ini adalah dengan menggunakan model teori pembuatan kebijakan luar negeri dari William D Coplin. William D. Coplin berpendapat bahwa terdapat tiga determinan yang memengaruhi tindakan politik luar suatu negara: politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional (Coplin 1992). Ketiga determinan tersebut diharapkan dapat menjawab alasan Iran melakukan Kerja sama dengan Tiongkok yang meskipun banyak poin dari kerja sama tersebut merugikan Iran. Berikut ini (lihat gambar 1.1) adalah kerangka determinan yang memengaruhi tindakan politik luar negeri suatu negara menurut William D. Coplin.

Gambar 1.1 Determinan yang Memengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri Menurut William D. Coplin.



William D. Coplin juga menjelaskan bahwa penerapan dalam determinan – determinan yang memengaruhi politik dalam negeri yaitu birokrasi, partai, kepentingan, dan massa yang memengaruhi keputusan penyusunan politik luar negeri juga dipengaruhi dengan kondisi pemerintahan negara yang akan dianalisis apakah negara tersebut memiliki sistem pemerintahan yang terbuka atau tertutup. Perbedaan sistem pemerintahan yang terbuka atau tertutup ini akan berpengaruh pada determinan – determinan yang terkandung dalam politik dalam negeri yang dapat memengaruhi politik luar negeri suatu negara. Misalnya saja, dalam sistem yang tertutup determinan yang paling penting dalam isu kebijakan ekonomi adalah

birokratis, kemudian, partisan, kepentingan, dan yang paling kurang penting adalah massa atau media massa (Coplin 1992).

Iran memiliki sistem pemerintahan yang tertutup, hal ini ditandai dengan kepemilikan ideologi resmi negara seperti Iran dengan konsep prinsip *Guardianship of the Jurisprudent* atau *velayat-e faqih* nya yang menempatkan faqih pemimpin dan penjaga rakyat yang memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi perintah – perintah Tuhan dan menjaga masyarakat dari melakukan hal buruk (Haghyeghi 1993, 37; Coplin William D. 1992, 81). Sehingga, determinan di dalam politik dalam negeri Iran yang akan paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri Iran yaitu birokratis Iran, partisan, kepentingan, dan kemudian media massa.

Selanjutnya, determinan yang memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri negara tertentu menurut William D. Coplin yaitu kapasitas ekonomi dan militer. Determinan ekonomi dalam memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara setidaknya dipengaruhi oleh kapasitas produksi barang dan jasa yang meliputi jumlah penduduk, *gross national product* (GNP) perkapita dan ketergantungan negara terhadap perdagangan dan finansial internasional yang meliputi analisis terhadap neraca pembayaran tertentu. Adapun di dalam bidang militer, William D. Coplin menyebutkan beberapa poin penting yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri negara tertentu seperti jumlah militer, sifat perlengkapan militernya, dan tingkat ketergantungan militer pada sumber – sumber luar negeri (Coplin 1992).

Adapun dalam determinan keadaan konteks internasional yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, William D Coplin menyebutkan beberapa determinan turunan yaitu keadaan geopolitik negara tersebut, konteks hubungan ekonominya dengan negara lain seperti arus pergerakan barang dan jasa yang membuat negara – negara tertentu bergantung dan berhubungan baik dengan negara lain, dan konteks hubungan politik yang dibentuk dengan negara – negara lain (Coplin William D. 1992, 167)

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara dari penelitian ini adalah bahwa pengesahan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* oleh Iran dilatarbelakangi oleh politik domestik Iran, keadaan ekonomi dan militer Iran, serta konteks internasional. Politik domestik Iran pada masa Rouhani yang berusaha untuk membuka pasar, keadaan ekonomi Iran yang menurun dikarenakan sanksi, serta penglihatan Iran terhadap geopolitiknya sendiri dan geopolitik negara – negara tetangga Iran menjadi faktor yang kuat bagi Iran berani untuk mengesahkan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* meskipun dengan banyak kerugian yang didapatkan oleh Iran.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari

literatur – literatur yang telah ada untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih mendalam.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu Iran. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu tiga faktor yang memengaruhi Iran memutuskan untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*, yaitu politik domestik Iran, keadaan ekonomi dan militer Iran, serta konteks internasional.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data di dalam penelitian ini adalah dengan mengambil dari literatur seperti journal, website pemerintahan, dan berita – berita yang berkaitan dengan politik domestik Iran yang juga mencakup bagaimana pemerintahan Iran bekerja, literatur yang berkaitan dengan keadaan ekonomi Iran dan militernya, serta konteks internasional saat ini. Literatur – literatur tersebut kemudian dianalisis dan dipilah – pilah waktu terjadinya peristiwa.

1.8.4 Proses Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mencari bahan bacaan yang berkaitan dengan Iran dalam range waktu ketika Supreme Leader Iran, Ayatollah Ali Khamenei berkuasa. Kemudian, bahan bacaan tersebut dianalisis seperti apa hasil penelitian dari bahan bacaan tersebut atau makna apa yang tersirat dalam bahan bacaan tersebut, serta bagaimana penulis menarik makna tersebut. Setelah itu, diambil kesimpulan mengenai keputusan Iran mau bekerja sama dengan

Tiongkok dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* dari berbagai bahan bacaan tersebut.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini yaitu pada **bab pertama** adalah berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran. Pada **bab kedua** akan membahas lebih jauh mengenai dinamika hubungan kerja sama Iran dengan Tiongkok yang mencakup sejarah hubungan Iran dengan Tiongkok, jalinan kerja sama antara Iran dengan Tiongkok yang memicu adanya kesepakatan ini, serta isi dari *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*. Adapun pada **bab ketiga** akan membahas mengenai keadaan politik dalam negeri Iran, perekonomian dan militer Iran, serta konteks internasional yang mendorong pembentukan kerja sama ini. Sedangkan pada **bab keempat** akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN KERJA SAMA IRAN DAN TIONGKOK

Sebuah perjanjian kerja sama yang disetujui oleh aktor – aktor di dalam politik internasional, tentu, perjanjian tersebut tidak akan dicetuskan ketika aktor – aktor yang mencakup dalam perjanjian tersebut baru saja bertemu. Membutuhkan interaksi yang panjang antar aktor hingga pada akhirnya interaksi tersebut melahirkan perjanjian yang diharapkan akan saling menguntungkan pihak – pihak yang bekerja sama. Refleksi gagasan ini juga dapat terlihat dalam pattern hubungan Iran Tiongkok yang interaksi antara kedua belah pihak ini melahirkan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*. Oleh karena itu, dalam bab kedua ini akan dibahas lebih mendalam mengenai interaksi – interaksi yang dilakukan oleh Iran dan Tiongkok dan kompleksitas dalam interaksi tersebut hingga pada akhirnya interaksi – interaksi tersebut melahirkan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*.

2.1 *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*

China-Iran 25-Year Cooperation Agreement merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh Iran dengan Tiongkok pada 27 Maret 2021. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari *Strategic Comprehensive Partnership* yang sebelumnya telah disepakati oleh Iran dan Tiongkok pada 2016 dalam artikel 6 dari *Strategic Comprehensive Partnership* tersebut (Greer and Batmanghelidj 2020) yang berbunyi,

“Mengingat tekad kedua belah pihak untuk memperluas hubungan antara kedua negara dan saling melengkapi potensi ekonomi mereka serta adanya berbagai bidang kerja sama seperti energi, infrastruktur, industri dan teknologi, kedua belah pihak setuju untuk melakukan konsultasi dan diskusi yang bertujuan untuk menyelesaikan Perjanjian

Kerja Sama Komprehensif 25 tahun bilateral dalam agenda mereka.”
(the Islamic Republic of Iran 2016).

China-Iran 25-Year Cooperation Agreement terdiri dari 9 artikel yang memiliki visi bahwa Iran dan Tiongkok akan bekerja sama berdasarkan standar ‘*win-win approach*’ dan misi bahwa kedua belah pihak akan bekerja sama untuk mendapatkan sembilan tujuan yaitu memperluas hubungan bilateral dalam bidang ekonomi dan perdagangan, memunculkan interaksi yang baik antara institusi privat dan publik serta memunculkan adanya *special economic zones*, melakukan peningkatan dalam sektor ekonomi, teknologi, dan turisme, adanya *strategic partnership* dalam berbagai bidang ekonomi, memperluas kerja sama dalam bidang pendidikan terutama untuk perguruan tinggi, secara konstan melakukan review dalam kerja sama ini serta menghilangkan penghambat – penghambat dalam kerja sama ini, melakukan koordinasi dan support antar kedua belah pihak dalam organisasi regional maupun internasional, melakukan kerja sama dalam bidang terorisme, serta melakukan kerja sama di bidang – bidang yang lain (Greer and Batmanghelidj 2020a).

China-Iran 25-Year Cooperation Agreement ini juga membawa nama proyek BRI milik China. Di dalam appendix 2 dalam *Draft Chinese-Iranian Comprehensive Strategic Partnership* yang membicarakan mengenai ranah kerja sama antara kedua belah pihak disebutkan dengan sangat jelas adanya ‘*active Involvement by Iran in China’s Belt and Road Initiative*’. Di dalam poin tersebut disebutkan ‘membangun kerja sama dan konsultasi mencakup partisipasi aktif dalam *south-north corridor (Chabahar Port-Central Asia)* dan *south-west (Chabahar dan Bandar Abbas-Turkey dan Azerbaijan)* berdasarkan prinsip kepentingan bersama’(Greer and Batmanghelidj 2020a, 28–30).

Adapun cakupan bidang dari *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* ini mencakup dalam bidang minyak dan energi, peran aktif oleh Iran dalam proyek BRI, pengembangan Mokran Coast, kerja sama dalam bidang teknologi telekomunikasi, kerja sama dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, kerja sama bilateral dalam militer dan keamanan, dan kerja sama dalam bidang politik (Greer and Batmanghelidj 2020a, 28–30).

2.2 Sejarah Hubungan Kerja Sama Iran dengan Tiongkok

2.2.1 Sharing 'Common History'

Sejarah kerja sama Iran Tiongkok yang kebanyakan dimulai dan dilaksanakan pada abad ke-21 bukan merupakan suatu hal yang baru yang dimaklumi oleh kedua belah pihak. Keduanya sama – sama berbagi '*common history*' bahkan sebelum kedua negara ini terbentuk, yaitu dimulai ketika pada masa Achaemenid dynasty (500-330 BC) melalui jalur sutra. Sedangkan jalur sutra sendiri dibangun pada masa Han dynasty (130 BC). Kedua kerajaan ini saling bertukar diplomat antara satu dengan yang lainnya (Belal 2020).

2.2.2 Hubungan Iran Tiongkok pada awal 1990s

Hampir tidak ada hubungan bilateral antara Iran dengan Tiongkok pada awal dua dekade setelah Perang Dunia Kedua. Keduanya mengalami masa seperti 'berjalan pada masing – masing jalannya sendiri'. Tiongkok pada 1966 hingga 1976 sedang mengalami *The Proletarian Cultural Revolutions* (PRC) di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Mao Zedong berusaha untuk menanamkan versi ideologi komunis yang baru khusus untuk Tiongkok yang berbeda dengan versi

ideologi komunis Russia. Melalui PRC ini, Mao Zedong juga berusaha untuk membuang sisa – sisa bourgeois dan capitalist di China (Belal 2020).

Adapun pada saat yang bersamaan Mao Zedong berusaha untuk membuang sisa – sisa kapitalisme, Iran yang dipimpin oleh Reza Pahlavi sangat menyukai modernisme versi Barat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Iran. Beberapa modernisasi lain yang dilakukan oleh Reza Pahlavi adalah dengan melakukan kontrol terhadap pendidikan di Iran agar pendidikan di Iran tidak dikuasai oleh petinggi agama Iran, mendukung organisasi atau gerakan politik kanan perempuan serta memberikan batasan minimum bagi perempuan untuk menikah, membolehkan *Western fashion* masuk dengan bebas ke Iran, melarang pemakaian *chador* bagi para siswa, serta dimulai banyaknya industri di Iran (Garver 2006). Reza Pahlavi juga melihat bahwa komunisme merupakan '*the biggest threat*' bagi Iran, mengingat bahwa naiknya Reza Pahlavi juga mendapatkan support dari British dan Americans (Belal 2020).

Namun di sisi lain, tepat satu tahun sebelum revolusi Iran 1979, Tiongkok berusaha untuk menjalin hubungan dengan Iran dengan ditandai dengan kunjungan kenegaraan ketua (*Chinese Communist Party*) CCP Hua Guofeng ke Iran pada tahun 1978. CCP melihat potensi Iran sebagai salah satu dari negara dunia ketiga yang kuat yang dapat menjadi *buffer zone* ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada Desember 1978 – Februari 1989. Namun, kunjungan ini tidak dibalas oleh Iran karena Amerika Serikat menjadi teman yang sangat dekat bagi shah Iran pada saat itu (Belal 2020).

2.2.3 Hubungan Iran Tiongkok di Bipolar World

Hubungan antara Iran dengan Tiongkok dimulai dengan pengakuan Tiongkok terhadap Islamic Republic of Iran yang baru pada 14 Februari 1979 tepat tiga hari setelah rezim yang lama di Iran terjatuh (Belal 2020).

Suatu hal yang menarik dari bagaimana Iran menyikapi politik luar negerinya di tengah – tengah dua super power (Amerika Serikat dan Uni Soviet) adalah dengan menerapkan kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Ayatullah Ali Khomeini berupa *'Neither East or West'* serta kebijakan *'Non Alignment'*. Dari sini, dapat dilihat bahwa Iran dengan rezimnya yang baru berusaha menjadi negara yang independen dari dua kekuatan besar pada saat itu. Dengan adanya dua prinsip tersebut, Iran juga menerapkan hal yang sama terhadap Tiongkok yang artinya bagaimana seharusnya visi misi yang diharapkan oleh Khomeini terhadap Tiongkok adalah *'tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh'* (Belal 2020).

Setelah pengakuan oleh Tiongkok terhadap Pemerintahan Iran yang baru, hubungan bilateral di antara keduanya mulai banyak dilakukan terutama ketika dua peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan dalam politik internasional terjadi yaitu invasi Soviet ke Afghanistan yang terjadi selama sembilan tahun dari Desember 1979 sampai Februari 1989 serta Perang Irak – Iran dari September 1980 sampai Agustus 1988. Iran khawatir jika invasi Soviet ke Afghanistan akan melebar ke wilayah Iran (Belal 2020).

Keduanya baik Iran maupun Tiongkok dalam melakukan hubungan bilateralnya pada awal 1990-an dilandasi dengan fakta bahwa keduanya memiliki kekhawatiran yang sama dengan langkah apa yang akan dilakukan oleh Uni Soviet selanjutnya akan membahayakan keduanya serta fakta bahwa keduanya terjatuh

dalam *coincidence* yang sama yaitu bahwa keduanya sama – sama belum stabil. Tiongkok sedang dalam tahapan menggalakkan *'peaceful rise'* dan modernisasi setelah tragedi *The Proletarian Cultural Revolutions* (PCR) 1966 – 1976. Di sini Tiongkok melihat Iran memiliki potensi aset ekonomi dan energi dari Iran serta jika dilihat dari sisi geopolitik Tiongkok melihat Iran sebagai *line defence* dari negara – negara Barat. Sedangkan di sini lain, Iran sedang dalam tahapan memposisikan diri dalam dunia internasional dengan pemerintahannya yang baru serta Iran juga membutuhkan dukungan untuk membantunya dalam Perang Irak – Iran (Belal 2020).

Pada saat Perang Iran Tiongkok, Tiongkok membantu Iran dengan menyediakan *Silkworm anti-ship missiles* serta memberikan kartu oposisi terhadap resolusi *United Nation Security Council* (UNSC) untuk memberikan embargo persenjataan terhadap Iran. Tiongkok juga membantu Iran dalam bentuk support diplomasi di UNSC untuk mengakhiri perang. Selain itu, Iran juga memberikan support kepada Tiongkok ketika tragedi Tiananmen Square yang membahayakan pemerintahan CCP pada Juni 1989 (Belal 2020, 50).

2.2.4 Hubungan Iran Tiongkok Pada Tahun 2000-2021

Sejak dua peristiwa besar yang terjadi dalam akhir abad ke-20, hubungan bilateral Iran – Tiongkok menjadi lebih erat. Kerja sama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara ini melebar tidak hanya dalam bidang diplomatik dan militer atau keamanan namun juga dalam bidang ekonomi. Berikut adalah tabel hubungan bilateral Iran Tiongkok pada tahun 2000 hingga 2021.

Tabel 2.1 Hubungan Bilateral Iran Tiongkok dari Tahun 2000 hingga 2021

No.	Kebijakan Hubungan Bilateral	Tahun	Kepresidenan
Sektor Ekonomi dan Energi			
1.	<i>Iran's Pars Oil and Gas Company</i> dan <i>China National Offshore Oil Corp</i> membentuk sebuah <i>agreement</i> menanamkan eksploitasi oil gas di North pars dan berencana menjualnya dari North Pars gas field ke pasar internasional.	2008	Mahmoud Ahmadinejad
2.	Sinopec Group (<i>China's Oil Giant Company</i>) berencana untuk membeli 250 million tons LNG untuk 30 tahun yang akan datang 30 tahun dari Iran.		
3.	Iran menjadi supplier minyak terbesar ke Tiongkok setelah Saudi Arabia, sekitar 300.000 barel per hari.		
4.	Lebih dari 100 perusahaan milik Tiongkok membantu membangun proyek infrastruktur Iran - <i>highways</i> , pelabuhan, <i>shipyards</i> , bandara, bendungan, <i>steel complex</i> dan lain sebagainya.		Mohammad Khatami
5.	Menteri Luar Negeri Tiongkok Tang Jiaxuan mempersempatkan upacara pengesahan subway pada 2000.	2000	Mohammad Khatami
6.	Presiden Jiang Zemin mengadakan kunjungan kenegaraan ke Tehran untuk meningkatkan hubungan dengan Iran pada tahun 2002.	April 18-22 2002	Mohammad Khatami
7.	Kerja sama perdagangan Iran-Tiongkok pada 2010 mencapai \$23 juta. China menjadi partner dagang terbesar Iran		Mahmoud Ahmadinejad
8.	Iran masuk ke dalam <i>Shanghai Cooperation Agreement</i> (SCO) sebagai observer.		Mahmoud Ahmadinejad

Sektor Keamanan			
1.	Iran mendapatkan Houdong, <i>fast patrol boat</i> , yang dilengkapi dengan C-802 (sebuah <i>high-speed cruise missile</i>) pada tahun 1990. Iran menggunakannya untuk menyerang U.S aircraft yang membawa <i>USS Kitty Hawk</i> and <i>the USS cruiser Cowpens</i> .	akhir tahun 1990-an dan pada tahun 2008	
2.	Iran memiliki <i>Shahab 3</i> (sebuah missile) yang katanya dapat menjangkau Israel. <i>The Shahab 4</i> dan <i>5</i> sedang dalam pengembangan di bahwa bantuan China. Iran melakukan uji coba <i>the Shahab 3</i> pada 2008.	2008	
3.	Tiongkok banyak mengekspor gasoline ke Iran untuk meredakan sanksi Amerika Serikat pada gasoline Iran.	2010	
4.	Tiongkok juga membantu pengembangan <i>Esfahan Nuclear Research Center</i> .	1984 - now	
Sektor Politik dan Diplomasi			
1.	Tiongkok memveto sanksi UNSC selama tahun 2000s untuk menghentikan program nuklir Iran.	2000s	
2.	Tiongkok memulai kerja sama dengan Iran ketika <i>Iran Deal</i> mulai dilaksanakan + mendorong para penandatanganan <i>Iran Deal</i> untuk mengimplementasikannya + mengkritisi Trump karena telah keluar dari <i>Iran Deal</i> .	2015 - Trump presidency	
3.	Veto Tiongkok ketika USA berusaha untuk memperpanjang UN embargo persenjataan kepada Iran pada tahun 2020.	2020	

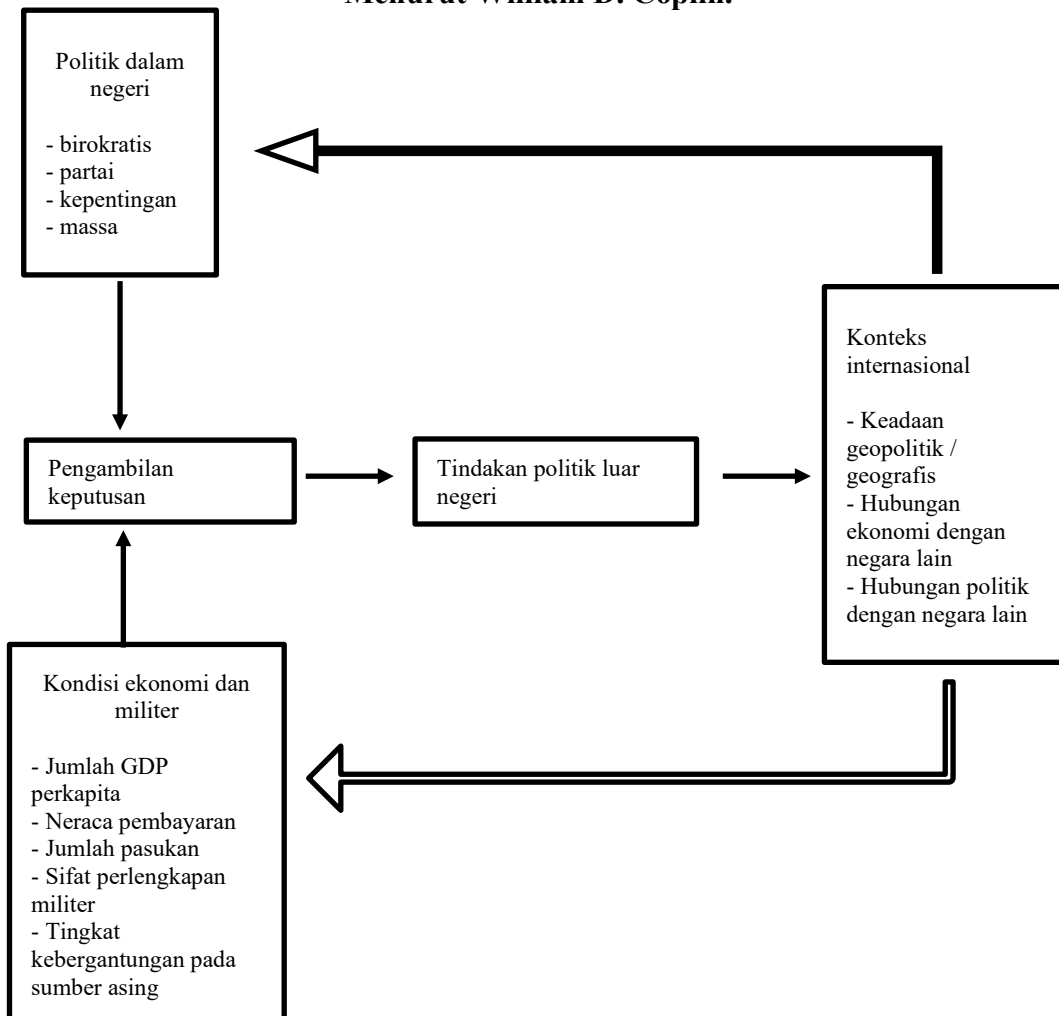
Sumber: Policy Perspective (2020), The Journal of East Asian Affairs (2011)

BAB III

ANALISIS 25 YEARS COOPERATION AGREEMENT ANTARA IRAN DAN TIONGKOK MELALUI *DECISION MAKING PROCESS*

Dalam bab 3 berikut ini, penulis akan menganalisis *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* melalui proses pembuatan kebijakan yang digagas oleh William D. Coplin. William D. Coplin mengatakan ada 3 determinan seorang aktor dalam mengambil sebuah keputusan antara lain politik dalam negeri, ekonomi dan militer serta konteks internasional. Berikut bagan 3.1 merupakan implementasi dari teori proses pembuatan kebijakan yang digagas oleh William D. Coplin.

Bagan 3.1 Determinan yang Memengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri Menurut William D. Coplin.



3.1 Keadaan Politik Dalam Negeri Iran Yang Mendorong *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*

Dalam menganalisis keputusan Iran yang menyetujui *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*, analisis pertama adalah melihat pada bagaimana politik dalam negeri Iran yang mendukung persetujuan tersebut. William D. Coplin mengatakan, “peran politik dalam negeri dalam penyusunan politik luar negeri dengan membedakan empat tipe *policy influencers* (1) birokrasi, (2) partisan, (3) kepentingan, (4) media massa.” (Coplin 1992, 81).

3.1.1 Faksionalisme di Iran

Faksionalisme di Iran sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Iran. Faksionalisme di Iran dibagi menjadi empat kategori yang berporos pada sumbu y dan x. Sumbu y melambangkan kedudukan politik berupa *theocratic* dan *republican*. Sedangkan sumbu x melambangkan posisi ekonomi, semakin ke kanan menunjukkan posisi ekonomi yang mendukung perekonomian yang terbuka (Mohseni 2016, 6–10).

Theocratic left (hardliners) menjadi kekuatan inti politik domestik Iran. Negara ikut campur tangan dalam perekonomian dan cenderung menyukai ekonomi yang tertutup serta sangat ketat dalam menerapkan nilai – nilai revolusi Islam Iran tahun 1979. *Theocratic right (conservatif)* lebih menyukai keterbukaan terhadap ekonomi serta negara yang melonggarkan prinsip nilai – nilai revolusi Islam Iran. Adapun *republican left (reformist)* menginginkan negara melonggarkan prinsip nilai – nilai revolusi Islam Iran, namun masih mengharapkan negara memegang kontrol ekonomi. Sedangkan *republican right (modernist)* menginginkan

keterbukaan dalam ekonomi serta melonggarkan penerapan prinsip revolusi Islam Iran (Mohseni 2016, 6–10).

3.1.2 Hubungan Birokrasi, Partai, Kepentingan, dan Faksionalisme Pendorong Kesepakatan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*

Sistem politik di Iran sangatlah kompleks. Kunci dari kekuatan politik di Iran secara umum di pegang oleh *supreme leader* yang memberikan dasar dalam pembuatan keputusan; kemudian terdapat divisi eksekutif yang dipimpin oleh presiden, divisi legislatif yang disebut dengan *the Majles*; *judiciary*; dan *Iranian forces* yang terdiri dari *the Artesh* (militer biasa) dan IRGC. Proses pembuatan keputusan di Iran lebih mengutamakan informal daripada formal yang artinya proses pembuatan kebijakan yang faksi – faksi atau individu tertentu lebih berpengaruh dibandingkan sistem kepartaian (Tabatabai Ariane M. 2019, 2).

Otoritas utama dalam pembuatan keputusan dalam hal ekonomi di Iran terdiri dari

- menteri – menteri yang berhubungan permasalahan ekonomi
- *the Majles* secara keseluruhan, pada periode kedua Rouhani pendukung Rouhani menempati 43% dari *the Majles*, independent sebanyak 25% dan 28% adalah theocrats. Dari proporsi *the Majles* ini, memudahkan Rouhani untuk membuat kebijakannya diterima oleh *the Majles*. Mengingat bahwa tidak ada kesepakatan internasional yang akan disepakati melainkan *the Majles* juga menyetujui kesepakatan tersebut (Mohseni 2016, 27)
- *supreme Economic Council* yang dipimpin oleh presiden
- *the Guardian Council* yang memiliki kekuatan untuk menganalisis keputusan dan menolak legislasi dari *the Majles* serta *the Expediency*

Council yang memberikan nasehat kepada *Supreme Leader* (Green, Wehrey, and Wolf 2009, 22–23).

Sedangkan untuk menarik investasi dari luar ke Iran, beberapa entitas di bawah ini memegang peranan penting, yaitu

- *High Council for Investment*, yang berada di bawah kewenangan *minister of Economy and Finance*
- *High Council of Free Trade Zones*, yang bekerja secara langsung di bawah perintah presiden
- *Supervisory Board for the Attraction and Protection of Foreign Investment*
- *Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran*, sebuah organisasi yang dipegang oleh Ministry of Economic and Finance
- *Ministry of the Interior, Labor, and Social Affairs*
- *Costum agency*
- *Iranian private organization*
- *Central Bank of Iran (Bank-e Markazi)* (Green, Wehrey, and Wolf 2009, 22–23).

Seperti halnya yang telah diketahui bahwa keputusan kebijakan luar negeri di Iran lebih bersifat faksional dan informalitas, begitu juga dalam permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, birokrasi yang sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan penandatanganan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* adalah Rouhani. Rouhani menjadi *policy maker* sekaligus *policy influence* untuk *Supreme Leader* di dalam kerja sama Iran Tiongkok. Rouhani berasal dari *Association Combatant Clergy* dan *Moderation and Development party*. Kedua partai ini

memiliki akar *republican* atau *ijtihadi cluster*. Golongan ini mendukung adanya pluralisme, sebuah sistem politik Islam yang demokratis, adanya kontrol sosial dan politik yang lebih longgar, keterbukaan ekonomi, dan lebih terbuka dengan dunia luar. Golongan *republican* berbeda dengan golongan *theocratic* atau jihadi yang memiliki tokoh seperti *Supreme Leader* Ali Khamenei yang berpendapat bahwa Iran harus mandiri dari dunia luar serta mengutamakan puritas *Iran-Islamic style* (Green, Wehrey, and Wolf 2009, 25).

Pendekatan Rouhani dalam politik luar negerinya adalah seperti pendekatan presiden Iran yang lainnya, sebuah pendekatan yang ditegakkan sejak berdirinya Republik Islam Iran, yaitu memaksimalkan pengaruh Iran di kawasan. Hanya saja, cara yang ditempuh oleh Rouhani berbeda. Bagi Rouhani, memajukan ekonomi Iran tidak hanya penting untuk menjadi pendukung domestik politiknya namun juga untuk meningkatkan pengaruh Iran di regional maupun global. Sedangkan orang – orang dari golongan *hardliners* melihat pendekatan ekonomi adalah pendekatan untuk masalah domestik saja. Kekuatan ekonomi merupakan inti kekuatan integral Iran dengan sedikit memberikan kelonggaran pada masalah sosial seperti kekhawatiran akan masuknya ideologi asing ke dalam masyarakat Iran jika investasi asing banyak masuk ke Iran. Rouhani juga bukan produk dari IRGC yang lebih menyukai isolasi untuk Iran. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa banyak kabinet yang dipilih oleh Rouhani adalah para teknokrat dan menyingkirkan orang – orang IRGC dari kabinetnya (Shanahan 2015, 3).

Hal ini menjadi menarik melihat Rouhani sebagai seorang reformis menjadi pelopor *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*. Hal ini terjadi karena ketika *green movement* tahun 2009 (sebuah gerakan protes yang menyelisihi hasil

pemilihan Iran tahun 2009, yang kebanyakan dari mereka adalah reformis). *Green movement* pada tahun 2009 memberikan slogan '*death to China*' setelah mereka melihat Tiongkok mendukung presiden terpilih Ahmadinejad serta mereka juga menuduh Tiongkok telah memberikan persenjataannya untuk rezim terpilih untuk menekan para protestor. Jawaban dari kebingungan ini adalah seperti yang telah dijelaskan bahwa permasalahan ekonomi seperti isolasi dari banyak negara serta fokus utama jalan pemikiran Rouhani terhadap ekonomi (Harold and Nader 2012).

Kemudian, permasalahan selanjutnya yaitu terletak kepada *Supreme Leader* yang masuk ke dalam golongan *theocratic left* yang melihat bahwa sanksi terhadap Iran merupakan sebuah '*blessing in disguise*' karena masuknya investasi asing ke Iran dikhawatirkan akan dapat mengubah moral masyarakat Islam Iran. *Supreme leader* merupakan otoritas tertinggi Iran yang akan memutuskan suatu keputusan atau tidak terhadap sebuah kebijakan. Dalam permasalahan ini, mengapa *Supreme Leader* memutuskan untuk menyepakati *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*? Jawaban dari pertanyaan ini bahwa Iran pada akhir – akhir ini sedang mengalami *inter-cluster operability* yaitu sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Green, Wehrey, dan Wolf dalam bukunya "*Understanding Iran*" (2009) untuk mengungkapkan bergeraknya konservatif Iran menuju ke kanan dengan memulai untuk menerapkan kebijakan – kebijakan dari golongan pragmatis dan reformis. Perubahan ini dilakukan oleh mereka karena mereka menyadari bagaimanapun juga mereka harus berubah, melihat karena adanya perubahan pada Iran terutama pada keadaan domestik Iran seperti anak muda yang banyak menganggur serta tuntutan dari anak muda yang menginginkan keterbukaan dengan dunia luar atau

kekhawatiran jika mereka tetap pada sistem ketat mereka, masa depan dari rezim Islam Iran (*Islamic Regime*) akan beresiko (Green, Wehrey, and Wolf 2009).

3.1.3 Determinan Media Massa Pendorong Kesepakatan China-Iran 25-Year Cooperation Agreement

Selanjutnya, selain (1) *association combatant clergy* serta *moderation and development party*; dan (2) Rouhani yang menjadi tipe influencer dalam negeri Iran dalam menyetujui *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* adalah media massa. William D. Coplin mengatakan, “dalam sistem politik tertutup, sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh para pembuat kebijakan itu sendiri. Media massa digunakan oleh para pengambil keputusan dengan harapan akan dapat membentuk suatu iklim opini masyarakat yang mendukung kebijakan – kebijakan luar negeri mereka. Para pengambil keputusan harus pandai dalam memupuk iklim opini, sehingga pada kesempatan selanjutnya tidak ada peluang bagi masyarakat untuk menggagalkan kebijakan tersebut.” (Coplin 1992, 88–89). Iran memiliki sistem politik yang tertutup, informal, dan secretive (Green, Wehrey, and Wolf 2009, 6). Oleh karena itu, media massa digunakan oleh pemerintahan Iran untuk memengaruhi opini publik yang mendukung kebijakannya.

Di tengah banyaknya isu yang menyebar di masyarakat mengenai *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* seperti jebakan utang, infrastruktur Iran yang buruk, serta kesepakatan yang tidak valid karena kesepakatan tersebut tidak melewati badan legislatif Iran –*the Majles*, Pemerintah Iran berusaha untuk menggiring opini masyarakat Iran bahwa Tiongkok merupakan partner kerja sama yang dibutuhkan oleh Iran dan bahwa *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* merupakan suatu hal yang baik untuk Iran di tengah sanksi ekonomi yang diberikan

oleh Amerika Serikat untuk Iran. Dalam hal ini, *framing* atau pembingkaiian dilakukan oleh Iran untuk merubah opini masyarakat Iran.

Framing merupakan suatu seleksi realitas tertentu sehingga realitas tersebut lebih menonjol dibandingkan realitas yang lainnya dalam teks komunikasi dengan (1) menekankan definisi dari sebuah masalah (*define problem*), (2) penyebab atau sumber masalah (*diagnose causes*), (3) membuat keputusan moral (*make moral judgment*), dan (4) merekomendasikan penyelesaian tertentu (*treatment recommendation*) (Eriyanto 2019, 71–72). *Islamic Republic News Agency* merupakan salah satu media massa Iran yang bekerja untuk membingkai berita *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* dengan sangat baik serta bahwa Tiongkok merupakan partner kerja sama yang berharga untuk Iran.

Berita pertama diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2019 dengan judul “*Developing a long-term road map in Iran-China relations is natural.*” Berita tersebut mendefinisikan topik kerja sama Iran dengan Tiongkok (*defining problem*) bahwa *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* ini merupakan suatu hal yang alami; dengan sumber masalah (*diagnose causes*) sanksi unilateral Amerika Serikat yang membebani Iran; ditambah menekankan keputusan moral (*make moral judgment*) terhadap Tiongkok bahwa Tiongkok merupakan *first trade partner* bagi Iran (diulang sebanyak 2x). Tiongkok merupakan negara dengan '*first rank development infrastructure*'; serta memberikan penyelesaian (*treatment recommendation*) dengan perlunya peningkatan hubungan kerja sama Iran dengan Tiongkok (Chairman of the Joint Chamber of Iran and China 2019).

Berita kedua diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan judul “*China remains Iran's first trade partner.*” Berita tersebut mendefinisikan (*defining*

problem) bahwa Tiongkok masih menjadi partner dagang utama Iran; dengan sumber masalah (*diagnose causes*) bahwa sanksi unilateral Amerika Serikat merupakan suatu hal yang buruk; ditambah menekankan keputusan moral (*make moral judgment*) bahwa (1) Iran tidak pernah berkonflik dengan Tiongkok baik pada masa dahulu atau sekarang, (2) ekonomi Iran-Tiongkok itu saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya; serta memberikan penyelesaian (*treatment recommendation*) bahwa hubungan Iran dengan Tiongkok harus ditingkatkan (Islamic Republic News Agency 2018)

Berita ketiga diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2021, beberapa bulan setelah kedua negara Iran dan Tiongkok menandatangani *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*, dengan judul “*Half a century of cooperation, a support for strengthening Iran-China relations.*” Berita tersebut mendefinisikan topik (*defining problem*) dengan support untuk meningkatkan hubungan Iran dengan Tiongkok; dengan menekankan sumber masalah (*diagnose causes*) bahwa tidak adanya hubungan yang mendalam antara Iran dengan Tiongkok merupakan suatu hal yang disesalkan; ditambah menekankan keputusan moral (*make moral judgment*) bahwa hubungan Iran dengan Tiongkok merupakan suatu hal yang sangat berharga (*very valuable*), *friendly exchange, mutually support*; serta memberikan penyelesaian (*treatment recommendation*) bahwa mencapai *comprehensive partnership* antara kedua negara akan memberikan manfaat bagi kedua negara (Islamic Republic News Agency 2021).

Selanjutnya berita yang terakhir diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2016, tahun di mana *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* mulai digagas, dengan judul “*The rise of Iran and China for investment; The first step is to hold the*

conference.” Berita tersebut mendefinisikan topik (*defining problem*) dengan bahwa kerja sama Iran Tiongkok untuk meringankan sanksi terhadap Iran; dengan menekankan sumber masalah (*diagnose causes*) kepada sanksi ekonomi terhadap Iran; ditambah menekankan keputusan moral (*make moral judgment*) bahwa (1) Tiongkok merupakan Iran’s largest trading partner, (2) friendly relations, (3) first trading and commercial partner, dan (4) hubungan bilateral Iran dengan Tiongkok meningkat 20% dari tahun 2016 ke 2017; serta memberikan penyelesaian (*treatment recommendation*) bahwa konferensi antara Iran dengan Tiongkok itu penting (Islamic Republic News Agency 2016).

3.1.4 Determinan Kepentingan Pendorong Kesepakatan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*

Selanjutnya poin terakhir dalam Iran yang menyepakati *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* yaitu determinan kepentingan. Golongan kepentingan yang mendukung *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* di sini, adalah mereka golongan - golongan yang mendukung serta memiliki sektor privat yang secara umum mendukung Iran untuk berinteraksi dengan ekonomi global atau mendukung Iran untuk lepas dari sanksi. Meskipun di sini, mereka tidak memberikan jari telunjuk untuk ‘setuju’ dalam bekerja sama dengan Tiongkok. Golongan ini yaitu mereka adalah kebanyakan berasal dari *bazaari* yang masuk ke dalam *theocratic right*, *mercantile interest*, dan *republican right* (Mohseni 2016, 13–14).

3.2 Keadaan Ekonomi dan Militer Iran Yang Mendorong *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*

Determinan selanjutnya yang memengaruhi keputusan Iran menyetujui *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* yaitu determinan ekonomi dan militer. William D. Coplin menyebutkan dimensi ekonomi dalam memengaruhi keputusan luar negeri suatu negara ada dua yaitu (1) kapasitas produksi barang dan jasa dan (2) ketergantungan relatif pada perdagangan dan finansial internasional. Sedangkan dalam dimensi kemampuan militer yaitu (1) kapasitas penggunaan kekuatan militer dengan melihat dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan, dan sifat perlengkapan militer (2) tingkat ketergantungan pada sumber luar negeri dan (3) ketidakstabilan internal dan kemampuan militer (Coplin 1992, 115–24).

3.2.1 Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam memengaruhi keputusan Iran untuk bekerja sama dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* mencakup beberapa poin. Poin yang pertama adalah melihat kepada GNP (*Gross National Product*) per kapita Iran pada pemerintahan Rouhani. Dari GNP perkapita ini dapat dilihat bagaimana perekonomian Iran yang mendesak untuk adanya kerja sama yang intensif dengan Tiongkok. GNP perkapita yaitu jumlah kekayaan suatu negara dibagi jumlah penduduk di negara tersebut, sehingga dengan melihat GNP akan dapat diketahui apakah jumlah kapasitas barang dan jasa di suatu negara telah memenuhi kebutuhan di negara tersebut atau belum (Coplin 1992, 115).

Tabel 3.2 Rasio GNP perkapita Iran pada masa pemerintahan Rouhani

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio GNP perkapita	-2.9	3	-3.6	6.8	1.3	-3.5	-3.7	2.5	4

Sumber: World Bank (2023)

Terlihat pada tabel 3.1 pada tahun 2016, ketika *China-Iran 25-year cooperation agreement* mulai dirancang, GNP perkapita Iran mengalami pertumbuhan. Namun pada akhirnya kesepakatan ini tertunda untuk sementara waktu hingga tahun 2021. Kemudian, melihat tiga tahun sebelum *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* ini disepakati, terlihat bahwa Iran mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi dari -3.5, -3.7, dan 2.5 secara berturut – turut dari tahun 2018, 2019, dan 2020 (World Bank 2023). Oleh karena itu, berusaha untuk mencari teman berdagang atau dalam hal ini yaitu mencari teman untuk berbagi ekspor dan impor sangat penting bagi Iran (Dagres and Slavina 2018, 4).

Poin yang kedua adalah mengenai ketergantungan Iran pada pasar internasional. Ketergantungan Iran pada pasar internasional dalam memengaruhi *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* dapat dilihat dari ekspor dan impor Iran ke dan dari negara lain. Terlihat pada tabel 3.2 dan 3.3 bahwa Tiongkok menjadi partner dagang utama Iran dari sepuluh negara terbesar dalam ekspor dan impor Iran di tengah boycott dan sanksi dari Amerika Serikat pada tahun 2017-2020 (TradeData.Pro 2023).

Tabel 3.3 Rasio impor Iran Periode Kedua Pemerintahan Rouhani (dalam juta USD)

Nama Negara	2017	2018	2019	2020
Tiongkok	18.80	14.09	9.61	8.51
UAE	14.38	10.70	7.08	4.53
South Korea	4.25	2.34	-	-
Turkey	4.08	3.06	2.60	2.14
Germany	3.43	3.12	1.63	1.68
India	2.67	2.86	3.86	2.24
Brazil	2.60	2.28	2.19	1.16
Italy	2.02	1.99	0.919	0.641

Sumber : Tradedata.pro (2023)

Tabel 3.4 Rasio ekspor Iran Periode Kedua Pemerintahan Rouhani (dalam juta USD)

Nama Negara	2017	2018	2019	2020
Taiwan	27.39	13.49	-	-
China	12.20	9.26	12.09	5.85
India	7.66	13.82	3.04	-
South Korea	7.38	3.81	1.90	-
Iraq	6.31	8.95	-	-
UAE	5.81	5.73	1.15	0.345
Turkey	4.07	2.44	1.51	1.16
Italy	3.64	3.19	-	-
Afghanistan	3.29	3.47	0.953	-
Japan	2.70	2.44	1.04	-

Sumber : Tradedata.pro (2023)

3.2.2 Dimensi Kemampuan Militer

Dimensi selanjutnya untuk melihat keputusan Iran dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* yaitu dimensi militer. Dimensi militer ini juga memainkan peranan penting dalam melihat kesepakatan Iran dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*, mengingat di dalam kesepakatan kerja sama Iran – Tiongkok ini, aspek militer juga masuk di dalamnya meskipun tidak sebanyak faktor ekonomi. Di dalam appendix tiga, poin yang kedelapan “*Military Defence and Military Cooperation*” di dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* menyebutkan (1) adanya support finansial untuk melakukan pertemuan reguler yang membahas mengenai kerja sama dalam bidang militer serta negosiasi dalam sektor perdagangan dan industri militer (2) peningkatan kerja sama penelitian dan latihan militer, pertahanan, dan keamanan (3) melakukan ekspansi dalam *defence* teknologi dan industri militer (4) dan melakukan latihan reguler militer bersama (Greer and Batmanghelidj 2020, 35).

Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer

William D. Coplin menyebutkan bahwa, “Negara – negara yang memiliki GNP yang tinggi akan mengalihkan GNP-nya untuk kekuatan militer atau untuk hal – hal yang berhubungan dengan konsumsi masyarakatnya.” (Coplin 1992, 126). Di sini, Iran dengan mengesampingkan ekonominya yang tidak stabil dikarenakan sanksi yang dikenakan padanya, banyak menghabiskan GNP-nya untuk keamanan Iran baik keamanan internal maupun eksternal. Misalnya saja pada tahun 2018, satu tahun setelah Amerika Serikat keluar dari *Iran Deals*, perekonomian Iran sangat turun hingga GNP perkapita Iran turun hingga -3.5, namun pada tahun sama Iran mencapai jumlah tertingginya dalam menghabiskan GDP-nya untuk keperluan militer hingga 6.1% dari total GDP-nya (*Gross Domestic product*) (lihat tabel 3.4). Hal ini menunjukkan Iran sangat mengutamakan keamanan teritorialnya, mengingat Iran dikelilingi oleh banyak camp militer Amerika Serikat, sedangkan Iran menganggap bahwa Amerika Serikat merupakan musuh terbesar Iran dan musuh terbesar bagi ideologi Iran setelah Revolusi Iran 1979 (United States. Defense Intelligence Agency 2019, 12).

Iran memiliki kontrol militer yang kuat. Secara umum, militer Iran dibagi menjadi dua yaitu IRGC dan militer biasa (*the Artesh*). IRGC dibentuk ketika Revolusi Iran 1979 sedangkan *the Artesh* telah ada sebelum Revolusi Iran 1979. *The Artesh* memiliki tugas untuk menjaga batas teritorial Iran dari serangan luar, sedang IRGC memiliki misi tambahan berupa menjaga revolusi Iran dari serangan dalam dan luar. Masing – masing dari IRGC dan *the Artesh* juga memiliki kekuatan cabang. Jumlah IRGC pada tahun 2019 adalah sebanyak 640,000. sedangkan

jumlah *the Artesh* adalah 420,000. Sehingga, jumlah total militer Iran adalah 1,060,000 pada tahun 2019 (United States. Defense Intelligence Agency 2019, 11).

Iran juga memiliki banyak partner negara latihan militer bersama, seperti Iran memiliki hubungan kerja sama militer dengan Syiria, Irak, Afghanistan, Belarus, Tiongkok, Oman, Russia, Afrika Selatan, Sudan, dan Venezuela. Selain itu, Iran juga banyak melakukan diskusi bersama mengenai masalah defense dan keamanan dengan Azerbaijan, Bolivia, Djibouti, India, Italy, Kazakhstan, Lebanon, Pakistan, Qatar, Tanzania, Turki, dan Turkmenistan. Iran juga menjadi anggota dalam *Indian Ocean Naval Symposium* (IONS), sebuah forum kerja sama Angkatan laut yang terdiri dari 35 anggota (United States. Defense Intelligence Agency 2019, 16–17).

Kemudian, dalam sifat perlengkapan militer Iran, Iran membaginya ke dalam tujuh entitas yang masing – masing memiliki aktivitas perlengkapan militer Iran. Ketujuh entitas tersebut berada di bawah *Ministry of Defence and Armed Forces Logistic* (MODAFL). Ketujuh entitas tersebut yaitu (1) *Defense Industries Organization* yang mengatur mengenai suplai tank, kendaraan militer, artillery, amunisi, dan bom (2) *Aerospace Industries Organization* yang mengatur mengenai *ballistic missile, cruise missile, SAMs, AAMs, ATGMs* (3) *Iran Aviation Industries Organizations* yang mengatur mengenai *Light aircraft, UAVs* (4) *Marine Industries Organization* yang mengatur mengenai *small boats, surface combatants, dan submarines* (5) *Iran Electronic Industries* yang mengatur mengenai perlengkapan radar dan komunikasi militer (6) *Defense Industries Research and Training Institute* yang mengatur mengenai pendidikan dan penelitian mengenai teknologi science untuk mencapai tahap *self-sufficiency* dalam bidang industri

militer (7) sedangkan yang terakhir yaitu *Malek-Ashtar University of Technology* yang merupakan basis penelitian militer dan pengembangan dalam science dan engineering terapan (United States. Defense Intelligence Agency 2019, 83). Dari ketujuh entitas ini, menunjukkan bagaimana sifat perlengkapan militer Iran sangat teratur.

Tabel 3.5 Rasio Total Share Pengeluaran dalam bidang militer terhadap GDP Iran

Tahun	Rasio total share pengeluaran untuk militer terhadap GDP Iran (dalam persen)	Total Pengeluaran (juta USD)
2011	3.9	24.3
2012	4.6	27.4
2013	3.8	19.9
2014	3.2	16.9
2015	4.3	19.5
2016	4.1	19.9
2017	5.3	23.9
2018	6.1	27.3
2019	3.8	20.7

Sumber: (United States. Defense Intelligence Agency (2019))

Tingkat Ketergantungan pada Sumber – Sumber Luar Negeri

Pemahaman tingkat ketergantungan militer Iran pada sumber – sumber luar negeri adalah diawali dengan pemahaman doktrin militer Iran. Iran melihat bahwa doktrin militer mereka adalah berupa *deensive-deterrence*. Hal ini dikarenakan isolasi Iran secara regional serta Tabatabai (2019) mengatakan ‘ketidakmampuan Iran untuk mencapai teknologi yang dapat menyaingi teknologi militer negara lain’. Meskipun dalam pendapat yang kedua ini terdapat banyak faktor yang menghambatnya seperti permasalahan ekonomi Iran atau Iran mampu untuk meningkatkan teknologinya namun semuanya dilakukan berdasarkan

kondisi internal dan eksternal, seperti yang dikatakan oleh *IRGC Commander* tahun 2019, Chief Hossein Salami bahwa Iran sebenarnya mampu untuk meningkatkan jangkauan dari missile-nya dari 2000 km hingga 5000 km. Namun keputusan ini tidak dilakukan karena permasalahan politik dan ekonomi (Tabatabai 2019, 7–8).

Doktrin *deensive-deterrence* ini dilakukan dengan dua hal yaitu melalui missile program dan *non-state partners* di kawasan. Hubungan Iran dengan *non-state partner* di kawasan membantu Iran melindungi Iran dari serangan eksternal dengan menjaga kehadiran dan pengaruh Iran di kawasan tanpa harus mengorbankan warga negara Iran. Iran memberikan bantuan keuangan, menyediakan perlengkapan militer, dan mengadakan latihan bersama bersama mereka (Tabatabai 2019, 7–8). Para *non-state* aktor ini adalah seperti Hizbullah di Lebanon untuk menghadapi Israel, *Iraqi Shia militias* di Iran untuk memerangi Islamic State, Houthis di Yaman untuk menghadapi Saudi Arabia, Palestinian Militant Group untuk mengkonfrontasi Israel, Taliban untuk mengcounter Amerika Serikat di Afghanistan, *Shia Foreign Fighters* mencakup Fatimiyyun, Zainabiyyun, dan Heidariyyun yang masih – masing berada di Afghanistan, Pakistan, dan Irak (United States. Defense Intelligence Agency 2019, 58–63).

Tingkat ketergantungan militer Iran kepada sumber – sumber luar negeri juga bergantung dengan ekspor dan impor senjata. Pada tabel 3.5 menunjukkan Rusia dan Tiongkok menjadi satu – satu negara yang melakukan ekspor persenjataan mereka ke Iran pada masa Rouhani dan pada tabel 3.6 terlihat bahwa Iran banyak mengekspor senjatanya ke Irak, Houtis di Yaman, Venezuela, Syiria, dan penerima yang tidak diketahui (SIPRI 2023).

Table 3.6 Ekspor Persenjataan ke Iran pada era Rouhani (dalam satuan ribu, 0 menunjukkan kurang dari 0.5 ribu)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Tiongkok	9	9	9							28
Russia	4	4	4	413	3	3	3	2		436
Total	13	13	13	413	3	3	3	2		464

Sumber: Stockholm International Research Peace Institute (SIPRI) (2023)

Tabel 3.7 Ekspor Persenjataan dari Iran pada era Rouhani Rouhani (dalam satuan ribu, 0 menunjukkan kurang dari 0.5 ribu)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Houthi (Yemen)					20					20
Irak		33	9						0	42
Venezuela	1									1
Syiria	10	15	6	5						35
unknown recipient(s)	1									1
Total	12	47	15	5	20				0	99

Sumber: Sumber: Stockholm International Research Peace Institute (SIPRI) (2023)

Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer

William D. Coplin mengatakan, “fungsi kemampuan militer adalah digunakan untuk menjaga negara dari serangan negara lain, menjaga kestabilan internal negara agar rezim tidak runtuh, serta membantu dalam proses bencana alam.” (Coplin 1992, 128–29). Di sini, Iran memiliki sesuatu yang unik dalam fungsi militernya terutama pada IRGC. IRGC tidak hanya memiliki kontrol dalam keamanan namun juga dalam hal ekonomi. Presiden Rouhani mengatakan mengenai IRGC yang banyak memengaruhi perekonomian Iran pada masa Presiden Ahmadinejad, dalam rangka untuk menyindir mereka karena IRGC banyak memegang sektor ekonomi Iran sehingga menghambat investasi asing masuk ke Iran pada tanggal 16 September 2013, “IRGC bukanlah rival untuk privat sector.

Hari ini, IRGC memegang proyek ekonomi Iran yang penting yang sektor privat tidak dapat mengaturnya.” Dari pidato Rouhani ini menunjukkan bahwa IRGC tidak hanya memegang keamanan dari sisi militer namun juga memegang peranan penting dalam ekonomi Iran (Forozan and Shahi 2017, 82).

Salah satu bentuk IRGC memegang sebagian besar ekonomi Iran yaitu pada tahun 2009, IRGC berafiliasi dengan *consortium* (sebuah organisasi bisnis atau bank yang banyak memiliki anak perusahaan) *Tese'e Etemad Mobin* (TEM) membeli 51% share dari perusahaan besar telekomunikasi Iran yaitu *Telecommunication Company of Iran* (TCI). TEM terdiri dari tiga perusahaan besar yaitu *Iran Mobin Electronic Development*, *Shahriyar-e Mahestan*, dan *Setad (the Execution of Imam Khomeini's Order)*. *Iran Mobin Electronic Development* dan *Shahriyar-e Mahestan* merupakan perusahaan subsidiary dari IRGC. Sedangkan *Setad* merupakan perusahaan *non-state public* yang dikelola oleh *Office of the Supreme Leader* (Forozan and Shahi 2017, 81).

Adapun dalam konteks kemampuan militer untuk fungsi menjaga Iran dari serangan negara lain, Iran memiliki kapasitas yang cukup baik dalam hal militer angkatan laut, missile, dan mengadakan serangan teror sebagai langkah – langkah offensive (Saab 2018). Iran menduduki peringkat ketiga setelah Turki dan Mesir dalam kapabilitas militer di Timur Tengah (Al-Monitor 2023). Selain itu, Iran juga memproduksi secara domestik ASMC (*ant iship cruise missile*) yang memiliki kemampuan menahan rudal dari serangan luar serta mampu mendeteksinya sejauh 35 kilometer bernama *the Nasr*. *The Nasr* ini dikembangkan dari C-704 ASCM milik Tiongkok (United States. Defense Intelligence Agency 2019, 55–56).

3.3 Konteks Internasional Pendorong *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*

Selanjutnya adalah mengenai setting internasional dalam memengaruhi Iran bekerja sama dengan Tiongkok dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*. William D. Coplin mengatakan pengertian dari konteks internasional dalam memengaruhi kerja sama antar dua negara yaitu mencakup suatu tindakan yang diambil oleh seluruh negara baik pada masa lampau, sekarang, atau suatu tindakan yang mungkin untuk diantisipasi (Coplin 1992, 30). Berdasarkan pendapat William D. Coplin ini menunjukkan bahwa bagaimana Iran memutuskan untuk bekerja sama dengan Tiongkok jika dilihat dari sisi konteks internasional adalah bagaimana Iran memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan tindakan – tindakan kebijakan luar negeri seluruh negara.

Ditambah, Coplin juga menjelaskan mengenai aspek – aspek yang hidup di dalam lingkungan internasional yang memengaruhi suatu negara bekerja sama dengan negara lain, lima aspek tersebut yaitu aspek ekologis, arus idea, arus manusia, ekonomi internasional dan hukum internasional (Coplin 1992, 224).

3.3.1 Setting Ekologis

William Coplin menjelaskan mengenai setting ekologis bagi interaksi antar negara yaitu “berhubungan dengan seperti hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan biofisisnya dan bagaimana manusia memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan tersebut.” (Coplin 1992, 226). Berdasarkan pendapat Coplin ini, menunjukkan bahwa determinan geografis atau letak suatu negara sangat memengaruhi bagaimana negara tersebut mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk menetapkan suatu perjanjian atau permusuhan terhadap negara lain serta sebaliknya. Di dalam setting ekologis ini juga mencakup apa saja yang dicakup dari

wilayah negeri tersebut seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia (Coplin 1992).

Melihat bagaimana hubungan Iran – Tiongkok dilihat dari sisi geografi, maka fenomena ini dapat dilihat sebagai sebuah *coincidence*, sebuah fenomena yang terjadi kebetulan dalam satu waktu (Saraswat 2022). Iran dikelilingi oleh pegunungan – pegunungan dan padang pasir. Di bagian Utara Iran terdapat pegunungan Zagros, pegunungan Albur, dan pegunungan Armenia yang memisahkan Iran dengan Irak sekaligus dapat menjadi benteng defensive bagi Iran. Laut Kaspia di Utara dan laut Arab di Selatan juga menjadi benteng untuk Iran dari serangan luar. Adapun di Selatan dan bagian Selatan Timur Iran terdapat cuaca yang ekstrim dari Afghanistan dan Pakistan. Sedangkan perbatasan Iran dengan Turkmenistan, terdapat orang – orang yang berpindah – pindah di Turkmenistan yang memungkinkan jika akan menyerang Iran, maka mereka akan berurusan dengan kelompok kesukuan tersebut (Emil Avdaliani 2017).

Letak Iran yang berada di tengah – tengah benteng alam ini, dapat menjadi keuntungan bagi Iran seperti akan mempersulit intervensi dari luar terhadap politik dalam negeri Iran. Namun di sisi lain, letak geografis Iran yang seperti ini juga akan dapat membuat Iran kesulitan untuk bekerja sama dengan negara tetangga serta membuat Iran terisolasi dari negara – negara tetangganya. Iran kesulitan memproyekan kekuatan kepada negara – negara tetangganya. Kesulitan dari bekerja sama dengan negara tetangga dapat dilihat dari bagaimana ekspor impor yang dilakukan oleh Iran membutuhkan biaya tambahan yang banyak untuk transportasi (Emil Avdaliani 2017). Kemudian yang kedua, secara geografis Iran

juga terletak di *'persimpangan peradaban'* jika melihat kepada peta dari BRI yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Istanbul, Turki (Forough 2021a).

Lalu, bagaimana semua ini berhubungan dengan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*? Di sini lah letak *coincidence*-nya yaitu kesulitan Iran untuk menjangkau wilayah – wilayah di sekitarnya dikarenakan geografis Iran yang memberikan proteksi kepada Iran dari variabel dari luar Iran, semua ini mendorong Iran untuk bekerja sama dengan negara – negara di sekitarnya. Di saat Iran memberikan pengaruh geopolitiknya ke negara – negara di sekitarnya, di saat yang bersamaan Tiongkok dengan proyek jalur sutranya *China–Central Asia–West Asia* menjadi variabel yang masuk ke dalam perhitungan para pembuat kebijakan luar negeri Iran.

3.3.2 Arus idea

Idea merupakan keyakinan, informasi, atau citra yang tidak homogen serta tidak ada keepakatan universal mengenai keyakinan tersebut. Arus idea berarti bagaimana suatu idea berjalan atau mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. William D. Coplin menempatkan arus idea ini sebagai sebuah budaya dunia dengan mengatakan, “Kami mengaggap konsep budaya dunia untuk menyajikan kerangka analitis guna memandang arus idea sebagai setting interaksi antar negara.” (Coplin William D. 1992, 229).

Clericalism dan anti-Marxisme menjadi keyakinan yang mendasar untuk Iran. *Clericalism* menunjukkan bahwa Iran tidak hanya menjadi Islamic republic namun juga menjadi republik yang berkhaskan dengan pemuka agama (*clerical republic*). Selain itu berdasarkan mitologi yang dipegang oleh para pemuka agama Iran bahwa nabi sebelum wafat telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab untuk

memimpin ummah kepada ulama. Oleh karena itu di sini, Khomeini menolak penggunaan nama “*The Islamic Democratic Republic*” untuk menghilangkan sekularisme di Iran (MERIP Reports 1980, 22).

Adapun anti-Marxisme, prinsip ini diambil dari prinsip Khomeini “*Neither East Nor West*” yang berarti tidak hanya memberikan perjuangan terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet namun juga lebih menitikberatkan kepada perjuangan terhadap setiap aspek yang dapat mengkontaminasi ajaran Islam. Dikarenakan Marxisme merupakan ideologi yang banyak diikuti oleh kelompok non-religious, maka ‘*Islamic purity of Iran*’ memberikan perlawanan kepada Marxisme dan menghilangkan partai – partai Iran berbasis Marxisme (MERIP Reports 1980, 22)

Di sisi lain, Tiongkok memiliki ideologinya sendiri yang memiliki intisari kepercayaan yang berbanding terbalik dengan Iran. Xi Jinping berbicara dalam *Party’s 19th National Congress* bahwa, ”kami sadar bahwa Marxisme merupakan ideology yang fundamental yang menjadi arah petunjuk bagi partai kami dan bagi negara ini. ... oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan satu hal pun melemahkan arah petunjuk kami.” (Blanchette 2020, 4). Marxism merupakan ideologi yang fundamental bagi Tiongkok.

Meskipun demikian Iran dengan Tiongkok memiliki ideologi politik yang berbanding terbalik, namun keduanya memiliki irisan yang membuat keduanya bersepakat untuk menjalin kerja sama bilateral yaitu keyakinan terhadap ‘perjuangan melawan *Western World Order*’ dalam rangka melindungi ideologi mereka dari kontaminasi ideologi lain. Salah satu contohnya yaitu bagaimana Iran melabeli Washington dengan ‘*Great Satan*’ sebagai bentuk penolakan terhadap

rezim Iran yang sangat loyal kepada Washington sebelum Revolusi Islam Iran 1979 terjadi, dengan yang pada saat bersamaan Iran mencoba untuk berteman dengan negara – negara *non-Western* terutama mereka yang memiliki power untuk memveto dalam UNSC (*United Nations Security Council*) (Belal 2020, 51).

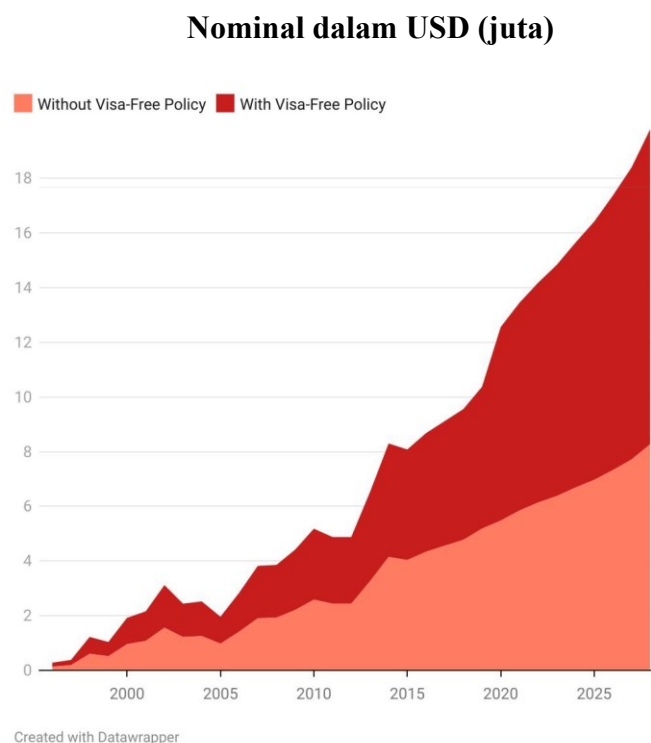
3.3.3 Arus Manusia

Aspek selanjutnya yang berkaitan dengan setting internasional dalam memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yaitu arus manusia. William D. Coplin menyebutkan bahwa arus manusia ini dapat berupa perjalanan individu dari satu negara ke negara lain baik untuk bisnis, bertamasya, belajar, atau urusan diplomatik (Coplin 1992, 232)

Iran memiliki banyak peninggalan sejarah dari kerajaan kerajaan Persia pada zaman dahulu. Oleh karena itu, sejak adanya sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat, Iran berusaha untuk meningkatkan industri dalam bidang tourism untuk menguatkan mata uang Iran. Salah satu bentuk dari aspek arus manusia dapat memperkuat hubungan Iran dengan Tiongkok hingga sampai menuju pada *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* yaitu bagaimana Iran pada Juni 2019 memudahkan semua visa masuk untuk penduduk berkebangsaan Tiongkok. Pada tahun 2018 tercatat dalam *United Nations World Tourism Organization* terdapat 150 ribu kunjungan yang dilakukan oleh penduduk berkebangsaan Tiongkok ke Iran (Maziar Motamedi 2019). Berikut ini adalah grafik perhitungan dampak ekonomi untuk Iran ketika menerapkan kebijakan '*removing visa requirement*' untuk pengunjung dari Tiongkok. Di dalam grafik 1 tersebut terlihat dari tahun 2015 – 2020 terdapat kenaikan jumlah turis dari Tiongkok dengan dibuktikan adanya kenaikan jumlah pendapat negara yang masuk ke Iran (Batmanghelidj 2019).

Tidak hanya dalam bidang tourism, dalam bidang pertukaran pelajar juga menjadi bentuk aspek arus manusia yang lainnya. Perhitungan dari Pemerintahan Tiongkok terhadap pelajar Iran yang belajar di Tiongkok berkisar 1400 pelajar pada tahun 2018. *Ministry of Science* dan Kedutaan Iran in Tiongkok menyatakan bahwa jumlah banyaknya atau sedikitnya pelajar Iran yang belajar di Tiongkok tergantung pada hubungan ekonomi yang terjalin di antara kedua negara ini. Ketika hubungan ekonomi antara Iran dan Tiongkok baik, maka jumlahnya meningkat dan juga sebaliknya. *Chinese language and literature* menjadi pilihan utama beberapa pelajar Iran, dengan harapan bahwa jika Tiongkok menjadi teman dagang utama Iran, maka peluang pekerjaan untuk lulusan Bahasa Tiongkok akan sangat dibutuhkan (Islamic Republic News Agency 2018a).

Grafik 3.9 Dampak Ekonomi untuk Iran dari Kebijakan Visa Free Travel untuk Pengunjung dari Tiongkok



Sumber: Esfandyar Batmanghelidj (2019)

3.3.4 Ekonomi Internasional

Selanjutnya, William D. Coplin menyebutkan ekonomi internasional sebagai salah satu aspek dalam setting internasional yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. William D. Coplin mengatakan mengenai ekonomi internasional bahwa, “ekonomi internasional merupakan produk dari pengambilan keputusan yang didesentralisasi (*decentralized decision making*).” (Coplin 1992, 234). Hal ini karena dalam sistem ekonomi internasional saat ini tidak ada hierarki, tidak ada otoritas pusat di dalamnya, sangat kompleks, dan independent. Ekonomi internasional sebagai setting internasional dalam memengaruhi kebijakan suatu negara berarti, bagaimana aktivitas – aktivitas kegiatan ekonomi baik yang dilakukan oleh negara maupun aktor non negara memengaruhi kebijakan negara tertentu (Coplin 1992, 241).

Kemudian, bagaimana ekonomi internasional sebagai setting internasional memengaruhi Iran mau untuk bekerja sama dengan Tiongkok. Untuk menjawab ide gagasan ini dapat dilihat dari kebijakan – kebijakan ekonomi negara – negara tetangga Iran terutama kebijakan – kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan Tiongkok.

Syria – Iran – Tiongkok

Pada tahun 2017, Iran dan Syria setuju untuk menghubungkan salah satu bandara di Iran yaitu Imam Khomeini port di Iran dengan bandara Latakia port di Syria dengan sebuah jalur kereta api yang dapat menghubungkan keduanya. Dalam pembuatan jalur kereta api ini, tentu akan melibatkan Iraq, karena wilayah geografi Irak yang berada di tengah – tengah kedua negara ini. Pembuatan jalur kereta api ini, tidak hanya untuk agar Iran dapat memiliki pengaruh geopolitik di dua negara

ini -yaitu seperti Iran yang mendukung Presiden Bashar Assad membantu rekonstruksi Syria, namun juga sebagai langkah Iran untuk menciptakan tempat kegiatan ekonomi dan transport dari wilayah teluk ke Syria dan Lebanon di area Mediterania (Saraswat 2022, 2–3), sebagai salah satu upaya Iran untuk meningkatkan perdagangan antara Iran dengan Syria, mengingat intensitas perdagangan antara kedua negara ini masih kecil (Sinaee 2021).

Di saat yang bersamaan, Tiongkok banyak memiliki hubungan yang baik dengan Syria. Seperti Tiongkok yang mendukung dan mensupport rezim yang sedang berkuasa di Syria dan kedaulatan nasional Syria seperti yang dilakukan oleh Iran di Syria (Saraswat 2022, 3). Di antara Syria yang kekurangan pendanaan untuk rekonstruksi pembangunan negara setelah perang (Bassiki and Mathiason 2021) dan Iran yang kekurangan dana untuk mensupport Bashar Assad (Sinaee 2021), Tiongkok mencoba masuk ke Syria dengan menawarkan proyek BRI nya di Syria pada tahun 2021 (Saraswat 2022, 3). Kehadiran Tiongkok di Syria ini yang kemudian yang menarik Iran untuk menjalani hubungan bilateral yang lebih intens pada masa yang akan datang.

Ditambah Tiongkok dan Iran yang secara kebetulan memiliki keinginan yang sama untuk menjadikan Latakia port di Syria sebagai zona perdagangan mereka. Oleh karena itu, terlihat bahwa Tiongkok dan Iran sangat mendukung adanya pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Iran dengan Syria ini (Saraswat 2022, 3).

Irak – Iran – Tiongkok

Di Irak, Iran membutuhkan Tiongkok untuk mewujudkan keinginan Iran dalam menghidupkan kembali jalur Iran-Irak-Syria *'friendship pipeline'* untuk membawa natural gas Iran keluar dari Iran untuk diperjualbelikan di pasar internasional melalui Baniyas port Syria. Iran, Irak, dan Syria telah menyepakati kesepakatan *'friendship pipeline'* ini pada tahun 2011. Iran membutuhkan Tiongkok di Irak yaitu dengan cara bagaimana agar proyek BRI dapat masuk ke Irak untuk menghalau pengaruh Amerika Serikat di Irak (Saraswat 2022, 4).

CPEC (*China Pakistan Economic Corridor*) dan Fokus Iran pada Macran Coast

Beberapa peristiwa dalam ekonomi internasional lain yang menarik Iran bersepakat dalam menyetujui *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* yaitu kesepakatan ekonomi yang disepakati oleh Pakistan dengan Tiongkok di bawah BRI dengan membawa proyek CPEC. Iran bermaksud agar proyek CPEC ini diperluas menjadi koridor perdagangan dan energi dari wilayah Teluk melalui wilayah Macran di Iran melewati Pakistan menuju ke Xinjiang Barat (Saraswat 2022, 4)

Iran-Taiwan-Tiongkok

Sejak awal tahun 2000-an hingga tahun 2019, perdagangan antara Iran dengan Taiwan sangat baik. Taiwan juga selalu masuk ke dalam sepuluh terbesar negara partner dagang Iran bersamaan dengan Tiongkok di dalam sepuluh negara tersebut. Namun, pada tahun 2019 hingga sekarang tidak ada data yang menunjukkan ekspor minyak dari Iran ke Taiwan (Jennifer Chang 2021; TradeData.Pro 2023). *China-Iran 25-Years Cooperation Agreement* dapat menjadi alat negosiasi bagi Iran untuk Tiongkok atas isu Taiwan. Mengingat objektivitas

hubungan Tiongkok dengan Iran bukan dilandaskan atas dasar ‘membantu Iran’ dari ekonomi yang menurun melainkan juga berhubungan dengan kompromi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu Taiwan (Jennifer Chang 2021). Semakin banyak Amerika Serikat membantu Taiwan, semakin banyak juga Tiongkok akan membantu Iran (Jennifer Chang 2021). Sehingga, dengan adanya perjanjian ini, Iran memiliki alat negosiasi untuk melonggarkan atau memperkuat hubungannya dengan Tiongkok, jika di kemudian hari Tiongkok mengancam kebijakan luar negeri Iran, seperti mengenai Tiongkok yang mendukung klaim tiga pulau Greater Tunb, Lesser Tunb, dan Abu Musa adalah milik UAE. Sedangkan, Iran juga mengklaim tiga pulau tersebut adalah miliknya (Chin 2022). Meskipun di sisi lain, *China-Iran 25-Years Cooperation Agreement* belum dapat menghidupkan kembali hubungan bilateral Iran dengan Taiwan.

3.3.5 Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan suatu sistem kelembagaan atau peraturan yang diharapkan dapat mengatur bagaimana negara – negara saling berinteraksi. Pembuatan hukum internasional dilakukan oleh negara – negara yang biasanya dilakukan di bawah organisasi tertentu, hal ini dikarenakan tidak ada badan legislatif yang disepakati oleh semua negara untuk memberikan otoritas untuk menetapkan hukum. Begitu pula dengan sistem peradilan dalam hukum internasional yang sangat bersifat desentralisasi. Meskipun terdapat lembaga – lembaga tertentu untuk memutuskan suatu hukuman, namun pelaksanaan hukuman itu akan diserahkan oleh negara tersebut atau terkadang terdapat fenomena yang negara lain atau negara yang merasa terancam keamanannya terhadap negara tertentu adalah yang akan akan berfungsi sebagai pelaksana hukum. Oleh karena

itu terkadang negara dalam sistem hukum internasional berfungsi sebagai pembuat hukum dan hakim (Coplin William D. 1992, 245–51).

Hukum internasional dapat memengaruhi kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara yaitu dengan cara sistem '*self help*' atau menolong diri sendiri. William D. Coplin mengatakan, "Prinsip menolong diri sendiri (*self help*) merupakan prinsip hukum yang digunakan untuk menerangkan tindakan pelaksanaan hukum secara individual." (Coplin 1992, 250). Menolong diri sendiri dapat dilakukan dengan mengajukan protes diplomatik, mengancam, penggunaan sanksi – sanksi tertentu, atau berperang (Coplin 1992, 250). Sistem '*self help*' ini bersifat dua arah (aksi-reaksi) yaitu misalnya negara A mengklaim bahwa negara B telah melanggar peraturan – peraturan tertentu yang dapat mengancam negara A seperti dengan memberikan sanksi, ancaman, atau berperang. Kemudian, negara B memberikan reaksi berupa akan memperbaiki kesalahannya atau menerima aksi negara A yang juga pada saat yang bersamaan mencari solusi untuk dapat keluar dari aksi negara A tanpa harus patuh terhadap aksi negara A (Coplin 1992, 250).

Beberapa hukum internasional yang memengaruhi Iran mau bersepakat dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* yaitu *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) yang dikeluarkan oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*) yang ditandatangani oleh Iran pada tahun 1967 (Laub 2015). NPT yang dikeluarkan oleh lembaga legislasi internasional yaitu IAEA menjadi salah satu dokumen yang menyebabkan adanya aksi yang dikeluarkan oleh beberapa negara berupa pernyataan sanksi terhadap Iran yang

dikeluarkan dalam bentuk dokumen – dokumen tertentu karena Iran terindikasi melanggar ketentuan dari NPT terutama ketika perang delapan tahun dengan Irak.

Beberapa dokumen tersebut adalah seperti dokumen – dokumen yang dikeluarkan oleh *US Department of the Treasury* mengenai sanksi Iran (US Department of Treasury n.d.; Laub 2015) salah satunya yaitu seperti *Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act* (CISADA), beberapa regulasi mengenai sanksi Iran yang dikeluarkan oleh EU (*European Union*) pada tahun 2007 (The Council of Europe 2007; Laub 2015), tahun 2010 (The Council of Europe 2010), tahun 2012 (The Council of Europe 2012) serta dokumen yang dikeluarkan oleh *European Commission* yang dikeluarkan pada tahun 2016 mengenai *Restrictive measures (sanctions) in force* (European Commission 2016). Sanksi – sanksi yang tercantum dalam dokumen – dokumen tersebut memberikan reaksi untuk Iran yaitu bagaimana agar Iran dapat hidup di bawah sanksi – sanksi tersebut. Pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa kebanyakan sanksi yang ditetapkan adalah sanksi terhadap ekonomi yang menjauhkan Iran dari berhubungan dagang dengan negara lain. Oleh karena itu, dengan adanya *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* dapat membantu perekonomian Iran yang terisolasi.

Tabel 3.10 Sanksi Terhadap Iran

No.	Sanksi dikenakan oleh	Bentuk Sanksi	Tahun
1.	UNSC (<i>United Nations Security Council</i>)	Embargo terhadap material dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan produksi uranium; menutup semua transaksi finansial yang berhubungan dengan pembuatan nuklir.	2006
		perberhentian terhadap nonhumanitarian assistance terhadap Iran; mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap kargo - kargo yang terindikasi membawa material yang terlarang.	2007 – 2008
		sanksi terhadap sektor finansial atau bank Iran, setiang langkah - langkah proliferasi, dan setiap profit yang Iran dapatkan dari sektor minyak.	2010
2.	<i>European Union</i>	membekukan setiap aset individu yang berhubungan program nuklir Iran.	2007
		memblokir setiap institusi di Eropa yang melakukan transaksi dengan Bank Iran; melarang setiap perdagangan dan investasi dalam sektor transportasi dan energi.	2010
		melarang setiap impor minyak Iran dan segala bentuk <i>prochemical products</i> dari Iran.	2012
3.	Amerika Serikat	memberikan sanksi terhadap setiap spesifik individu dan entitas baik yang memiliki kebangsaan negara Iran maupun non Iran yang berhubungan dengan setiap individu atau entitas yang dikenai sanksi.	–

	<p>Sektor Keuangan dan Perbankan - Amerika Serikat melarang setiap bank yang melakukan transaksi dengan bank - bank masuk ke dalam list sanksi untuk menggunakan mata uang US dollar serta tidak boleh melakukan transaksi di Amerika Serikat.</p>	2011
	<p>Sektor ekspor minyak - Sanksi akan diberikan kepada setiap entitas yang memberikan jasa ekspor minyak Iran ataupun yang berinvestasi di dalamnya.</p>	2011
	<p>Sektor perdagangan - embargo terhadap setiap perusahaan terutama perusahaan Amerika Serikat yang melakukan transaksi dan berinvestasi dengan Iran.</p>	2011
	<p>Sektor pembekuan terhadap aset dan larangan travel - pembekuan aset dan larangan travel bagi individu, institusi, dan IRGC yang tercatat dalam sanksi</p>	Sejak 2001 hingga saat ini
	<p>Sektor weapons development - <i>Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act (1992)</i> memberikan sanksi kepada setiap entitas yang membantu dalam perkembangan persenjataan Iran.</p>	1992

Sumber: US Department of the Treasury n.d.; Zachary Laub (2015)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Iran keberatan dengan *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* yang disepakati pada tahun 2021, pemerintah Iran tetap memilih untuk menyepakati kesepakatan ini karena dipengaruhi oleh tiga determinan yang diajukan oleh William D. Coplin yaitu determinan politik domestik, keadaan ekonomi dan militer, serta determinan sistem politik internasional.

Di dalam determinan politik domestik (a) presiden Rouhani dari golongan reformis yang memiliki kepercayaan bahwa ekonomi dapat menjadi tools untuk mencapai bagaimana agar Iran dapat berpengaruh di kawasan dengan (b) partainya *Association Combatant Party* dan *Moderation and Development Party*, (c) para *bazaari* yang cenderung dengan perekonomian yang terbuka serta (d) pemberitaan media yang memframing ‘baik’ hubungan Iran-Tiongkok terhadap masyarakatnya membuat *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Determinan selanjutnya yang memengaruhi *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* disepakati oleh Iran yaitu determinan ekonomi dan militer. Ekonomi Iran yang tidak stabil hingga GNP per kapita yang turun hingga -3.7 pada tahun 2019 serta Tiongkok yang selalu hadir dalam neraca perdagangan ekspor dan impor Iran di tengah isolasi banyak negara membuat Iran menandatangani kesepakatan ini dengan Tiongkok. Bahkan, dapat penulis katakan bahwa faktor ekonomi ini yang menjadi penentu utama dalam kesepakatan ini. Kemudian, di dalam faktor militer Iran memiliki pengaturan militer yang sangat teratur serta

menjadi negara kedua di Timur Tengah yang memiliki kekuatan militer terbesar. Selain itu, perlengkapan militer Iran ini juga banyak dilakukan *level-up* oleh Pemerintah Iran dengan melihat dari perlengkapan militer Tiongkok atas persetujuan Tiongkok. Dari sini sehingga faktor militer juga berpengaruh di dalam *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* ini.

Selain itu, dengan (a) banyaknya pengunjung dari Tiongkok ke Iran dan sebaliknya, (b) letak Iran yang dikelilingi oleh benteng – benteng alam yang membuat Iran kesulitan untuk berinteraksi dengan dunia luar sehingga diperlukan kerja sama – kerja sama antara Iran dengan negara tetangganya untuk mempermudah akses logistik ke Iran, (c) kesamaan ideologi yang dimiliki oleh baik Iran maupun Tiongkok yaitu ‘perjuangan melawan *western world order*’ (d) kebijakan – kebijakan ekonomi negara tetangga Iran yang kebijakan tersebut berhubungan dengan kebijakan ekonomi dengan Tiongkok serta (e) sanksi internasional yang diberikan oleh United Nations, Amerika Serikat, dan Uni Eropa semua faktor ini juga menjadi pendorong Iran menyepakati *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement*.

4.2 Saran dan Rekomendasi

China-Iran 25-Year Cooperation Agreement disepakati ketika Amerika Serikat pada masa Presiden Donald Trump keluar dari perjanjian nuklir Iran yang dirancang pada tahun 2015. Kemudian, masuk ke dalam masa pemerintahan Presiden Joe Biden, Iran berusaha untuk mengembalikan perjanjian nuklir tersebut. Dari sini, dapat diambil sebuah hipotesis baru yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yaitu apakah *China-Iran 25-Year Cooperation Agreement* dapat memengaruhi pengembalian perjanjian nuklir Iran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Monitor. 2023. "Middle East Military Rankings: Turkey Highest, Lebanon Lowest per Global Index ." Al-Monitor. January 12, 2023. <https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/middle-east-military-rankings-turkey-highest-lebanon-lowest-global-index>.
- Bassiki, Mohammad, and Nick Mathiason. 2021. "Revealed: Syrians Pay Tax to Rebuild after War but See Little Benefit." May 24, 2021. <https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/24/revealed-syrians-pay-tax-to-rebuild-after-war-but-see-little-benefit>.
- Batmanghelidj, Esfandyar. 2019. "Iran Visitor Exports." July 1, 2019.
- BBC. 2019. "Yuan Fall: Why Is China's Currency Getting Weaker?" August 6, 2019. <https://www.bbc.com/news/business-49245654>.
- Belal, Kulsoom. 2020. "China-Iran Relations: Prospects and Complexities." *Policy Perspectives* 17 (2). <https://doi.org/10.13169/polipers.17.2.0047>.
- Blanchette, Jude. 2020. "Strengthening the CCP's 'Ideological Work.'" <https://about.jstor.org/terms>.
- Chairman of the Joint Chamber of Iran and China. 2019. "[Developing a Long-Term Road Map in Iran-China Relations Is Natural](#)." Islamic Republic News Agency. July 14, 2019.
- Chin, Jonathan. 2022. "Taiwan Has Right to Independence: Iranian Newspaper." Taipei Times. December 15, 2022. <https://www.taipetimes.com/News/front/archives/2022/12/15/2003790744>.
- China Briefing Team. 2021. "China-Iran 25-Year Cooperation Agreement: A Non-Committal Framework to Support the Status Quo." July 16, 2021. <https://www.china-briefing.com/news/the-china-iran-25-year-cooperation-agreement-what-is-it-and-should-regional-investors-traders-pay-attention/>.
- Coplin, William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. 2nd ed. Bandung: CV Sinar Baru Bandung.
- Dagres, Holly, and Barbara Slavin. 2018. "Resrep20709 How Iran Will Cope with US Sanctions." *Atlantic Council*. <https://www.jstor.org/stable/resrep20709>.
- Emil Avdaliani. 2017. "The Iranian Fortress." August 28, 2017. <https://besacenter.org/iran-geopolitical-imperatives/>.
- Eriyanto. 2019. *Media Dan Opini Publik: Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing) Dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*. Depok.
- European Commission. 2016. "Overview of CFSP Related Sanctions in Force." July 7, 2016. https://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.
- Forough, Mohammadbagher. 2021a. *2 Geographic Agency Iran as a "Civilizational Crossroads" in the Belt and Road Geography*. Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789463727853_ch12.
- . 2021b. "Sino-Iranian 25-Year Deal." *Source: Atlantisch Perspectief* 45 (2): 27–32. <https://doi.org/10.2307/48638215>.
- Forozan, Hesam, and Afshin Shahi. 2017. "The Military and the State in Iran." *Source: Middle East Journal* 71 (1): 67–86. <https://doi.org/10.2307/90016291>.

- Garver, John W. 2006. "China and Iran: Ancient Partners in a Post-Imperial World."
- Green, Jerrold D, Frederic Wehrey, and Charles Wolf. 2009. *Chapter Title: Features of the Iranian System Book Title: Understanding Iran*. 1st ed. RAND Corporation. <https://doi.org/10.7249/mg771srf.9>.
- Greer, Lucille, and Esfandiyar Batmanghelidj. 2020a. "Last Among Equals: The China-Iran in a Regional Context." https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/MEP_200831_OCC%2038%20v3%20%281%29.pdf.
- . 2020b. "Last Among Equals: The China-Iran in a Regional Context." https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/MEP_200831_OCC%2038%20v3%20%281%29.pdf.
- Haghayeghi, Mehrdad. 1993. "Politics and Ideology in the Islamic Republic of Iran." *Source: Middle Eastern Studies*. Vol. 29. <https://www.jstor.org/stable/4283540>.
- Harold, Scott, and Alireza Nader. 2012. "Chapter Title: China and Iran: Economic, Political and Military Relations Book Title: China and Iran Book Subtitle: Economic, Political, and Military Relations." *RAND Cooperation*. <https://doi.org/10.7249/j.ctt1q60w8.7>.
- Iran Government. 2021. "The Iran-China 25-Year Comprehensive Strategic Partnership: Challenges and Prospects Position Paper."
- Islamic Republic News Agency. 2016. "[The Rise of Iran and China for Investment; The First Step Is to Hold the Conference.](#)" Islamic Republic News Agency. March 9, 2016.
- . 2018a. "[The Attractiveness of Chinese Universities for Iranian Students.](#)" June 28, 2018.
- . 2018b. "[China Remains Iran's First Trade Partner.](#)" Islamic Republic News Agency. October 9, 2018.
- . 2021. "[Half a Century of Cooperation, a Support for Strengthening Iran-China Relations.](#)" Islamic Republic News Agency. August 25, 2021.
- Jennifer Chang, I-wei. 2021. "Taiwan-Iran Economic Relations Under the International Sanctions Regime." Global Taiwan Institute. December 15, 2021. <https://globaltaiwan.org/2021/12/taiwan-iran-economic-relations-under-the-international-sanctions-regime/>.
- Laub, Zachary. 2015. "International Sanctions on Iran." Council of Foreign Relations. July 15, 2015. <https://www.cfr.org/background/international-sanctions-iran>.
- Maziar Motamedi. 2019. "Iran Wants More Chinese Tourists – a Whole Lot More." August 6, 2019. <https://www.aljazeera.com/economy/2019/8/6/iran-wants-more-chinese-tourists-a-whole-lot-more>.
- MERIP Reports. 1980. "Khomeini We Shall Confront the World with Our Ideology." *Middle East Research and Information Project*, June, 22–25. <https://www.jstor.org/stable/3011306?origin=JSTOR-pdf>.
- Mohseni, Payam. 2016. "The 2016 Iranian Parliamentary Elections And the Future of Domestic Politics under the JCPOA." www.belfercenter.org/theIranProject.
- Rasanah. 2020. "China-Iran to Conclude Controversial Strategic Deal | International Institute for Iranian Studies." August 5, 2020. <https://rasanah>

- iiis.org/english/monitoring-and-translation/reports/china-iran-to-conclude-controversial-strategic-deal/.
- Saab, Bilal Y. 2018. "Middle East Institute Report Part Title: IRAN'S TACTICS AND CAPABILITIES Report Title: BEYOND THE PROXY POWDER KEG: Report Subtitle: THE SPECTER OF WAR BETWEEN SAUDI ARABIA AND IRAN." <http://www.jstor.com/stable/resrep19957.14>.
- Saraswat, Deepika. 2022. "Iran's Ties with China: Synergising Geoeconomic Strategies." July 7, 2022. <https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/iran-ties-with-china-synergising-geo-economic-strategies.aspx>.
- Shanahan, Rodger. 2015. "Iranian Foreign Policy under Rouhani." <https://www.jstor.org/stable/resrep10162>.
- Shine, Sima, Eyal Propper, Bat Chen, and Druyan Feldman. 2020. "Institute for National Security Studies Iran and China: On the Way to a Long-Term Strategic Agreement?" <https://www.jstor.org/stable/resrep25517>.
- Sinaee, Maryam. 2021. "Iran Has Limited Economic Sway In Syria After Years Of Spending Resources." April 12, 2021. <https://www.iranintl.com/en/20211204048763>.
- SIPRI. 2023. "Importer/Exporter TIV Tables." Stockholm International Research Peace Institute . 2023. <https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php>.
- Tabatabai Ariane M. 2019. "RAND Corporation Report Part Title: Consensus and Division In Iranian Decisionmaking Report Title: IRAN'S NATIONAL SECURITY DEBATE." <http://www.jstor.com/stable/resrep20005.3>.
- Tabatabai, Ariane M. 2019. "RAND Corporation Report Part Title: National Security and Military Capabilities Report Title: IRAN'S NATIONAL SECURITY DEBATE." <http://www.jstor.com/stable/resrep20005.4>.
- Tabatabai Ariane. 2020. "NUCLEAR DECISION-MAKING IN IRAN: IMPLICATIONS FOR US NONPROLIFERATION EFFORTS." New York. www.sipa.columbia.edu.
- Tehran Times. 2021. "Iran Opens First Innovation, Technology Center in Africa - Tehran Times." Tehran Times. January 27, 2021. <https://www.tehrantimes.com/news/457449/Iran-opens-first-innovation-technology-center-in-Africa>.
- The Council of Europe. 2007. "COUNCIL REGULATION (EC) No 423/2007 of 19 April 2007 Concerning Restrictive Measures against Iran." April 19, 2007. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:103:0001:0023:en:PDF>.
- . 2010. "COUNCIL REGULATION (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 on Restrictive Measures against Iran and Repealing Regulation (EC) No 423/2007." October 25, 2010. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0001:0077:EN:PDF>.
- . 2012. "COUNCIL REGULATION (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 Concerning Restrictive Measures against Iran and Repealing Regulation (EU) No 961/2010." March 23, 2012. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:088:0001:0112:en:PDF>.

- The Economist. 2022. "Why China's Policymakers Are Relaxed about a Falling Yuan." September 6, 2022. <https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/10/06/why-chinas-policymakers-are-relaxed-about-a-falling-yuan>.
- the Islamic Republic of Iran. 2016. "Full Text of Joint Statement on Comprehensive Strategic Partnership between I.R. Iran, P.R. China." 2016.
- TradeData.Pro. 2023. "Iran Trade Data." TradeData.Pro. 2023. <https://tradedata.pro/asia-trade-data/iran-import-export-data/?year=2013&flow=export&depth=hs6>.
- United States. Defense Intelligence Agency. 2019. *Iran Military Power : Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance*. U.S Government Publishing Office.
- US Department of Treasury. n.d. "Iran Sanctions." Accessed June 10, 2023. <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions>.
- World Bank. 2023. "GDP per Capita Growth (Annual %)." The World Bank . 2023. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG>.